

No. 168 Februari - Maret 2020

# BaKTINews [www.bakti.or.id](http://www.bakti.or.id)

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA



**MENABUNG MINYAK BEKAS DI BANK JELANTAH**

**KOLABORASI MANTAP SEKBER ASMAT**

**KEGUNUNGAN,  
MENGUGAT SDGs**

TIDAK DIPERJUALBELIKAN  
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X



9 771979 777057



# BaKTI**News**

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

ISSN 1979-777X

[www.bakti.or.id](http://www.bakti.or.id)

Penanggung Jawab **M. YUSRAN LAITUPA**  
**ZUSANNA GOSAL**  
Editor **VICTORIA NGANTUNG**  
**ITA MASITA IBNU**  
Events at BaKTI **SHERLY HEUMASSE**

Praktik Cerdas & Info Buku **SUMARNI ARIANTO**  
Database & Sirkulasi **FADHILAH MANSYUR**  
Design & Layout **ICHSAN DJUNAED**  
Editor Foto

## Redaksi

**Jl. H.A. Mappanyukki No. 32 Makassar 90125, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 411 832228, 833383 Fax +62 411 852146**  
Email [info@bakti.or.id](mailto:info@bakti.or.id) atau [baktinews@bakti.or.id](mailto:baktinews@bakti.or.id) SMS BaKTI**News** 0813 4063 4999, 0815 4323 1888, 0878 4000 0201  
Facebook [www.facebook.com/yayasanbakti](http://www.facebook.com/yayasanbakti) Twitter [@InfoBaKTI](https://twitter.com/InfoBaKTI) Instagram [@InfoBaKTI](https://www.instagram.com/InfoBaKTI)

BaKTI**News** adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTI**News** adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTI**News** terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTI**News** disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTI**News** agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTI**News** juga dapat diakses di website BaKTI: [www.bakti.or.id](http://www.bakti.or.id) dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTI**News** dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTI**News** adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

*BaKTI**News** is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTI**News** aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTI**News** is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand Indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.*

*BaKTI**News** is sent by post to readers and the main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTI**News** is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTI**News** is also provided in an electronic version that can be accessed on [www.bakti.or.id](http://www.bakti.or.id) and can be sent electronically to subscribers with internet access.*

*BaKTI**News** is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.*

*Articles should also be sent with photos that illustrate the article. The editors of BaKTI**News** will edit every article for reasons of space and style. BaKTI**News** does not provide payment to writers for articles.*

## **MENJADI PELANGGAN BaKTI**News****

Subscribing to BaKTI**News**

Untuk berlangganan BaKTI**News**, silahkan mengirimkan data diri anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap yang disertai dengan kode pos melalui email [baktinews@bakti.or.id](mailto:baktinews@bakti.or.id).

Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil BaKTI**News** di Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja.

*To subscribe to BaKTI**News** please send us your full contacts details (including organization, position, HP number and email address) with full postal address to [baktinews@bakti.or.id](mailto:baktinews@bakti.or.id).*

*For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and pick up your copy from the display corner from Monday to Friday.*

## **BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTI**News****

Contributing to BaKTI**News**

BaKTI**News** menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua).

Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata, menggunakan Bahasa Indonesia maupun Inggris, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTI**News** akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTI**News** tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

*BaKTI**News** accepts articles about development programs, lessons learnt from an activity, development smart practices, research results that can be applied, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1,100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.*

# Daftar Isi

BaKTI News

Februari - Maret 2020

No. 168

- 1** Menabung Minyak Bekas di Bank Jelantah  
Oleh **SUMARNI ARIANTO**
- 5** Kolaborasi Mantap Sekber Asmat  
Oleh **DESY MUTIALIM & SYAIFULLAH**
- 9** Kegunungan, Menggugat SDGs  
Oleh **A. M. SALLATU**
- 13** Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak  
Oleh **MUTMAINNAH BAHRI**
- 16** KB Pria Berpartisipasi dalam Penanganan *Stunting*  
Oleh **SUMARNI ARIANTO**
- 19** Daya Saing Sulawesi Selatan  
Oleh **SYAHRIL**
- 22** Perkawinan Bukan Kepentingan Anak  
Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**
- 25** Sentuh Pustaka  
Oleh **TULUS WULAN JUNI**
- 29** Menyiapkan Fasilitator Sinergitas Perencanaan  
Oleh **HALIA ASRIYANI & NYUR YAWATI**
- 33** Food, Land And People  
Oleh **ESTER ELISABETH UMBU TARA**
- 37** 18 Pelatihan dan Masih akan Terus Bertambah  
Oleh **DESY MUTIALIM & SYAIFULLAH**
- 40** InfoBuku

■ Foto Cover :  
**Yusuf Ahmad/Yayasan BaKTI**





# Menabung Minyak Bekas di Bank Jelantah

Oleh **SUMARNI ARIANTO**

**D**i Kota Makassar setidaknya sebanyak 17 ton minyak bekas pakai atau minyak jelantah dapat dihasilkan setiap hari dari rumah tangga, hotel, restoran, dan pabrik makanan. Selanjutnya minyak jelantah ini kemudian berubah wujud menjadi minyak goreng curah dengan warna yang lebih jernih setelah dicampurkan dengan *hidrogen peroksida* ( $H^2O^2$ ) dan dipanaskan.



Semakin banyaknya minyak jelantah yang beredar untuk dikonsumsi kembali dalam bentuk minyak curah menjadi hal yang mengkhawatirkan. Ada bahaya yang besar bagi kesehatan jika minyak jelantah dikonsumsi kembali. Di sisi lain bila dibuang begitu saja tanpa penanganan khusus, minyak jelantah dapat mencemari air dan tanah.

Peraturan Walikota Makassar terkait pengendalian minyak jelantah sendiri sudah ada, yakni Perwali Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pengendalian Peredaran



Konsumsi rumah tangga yang banyak menghasilkan minyak jelantah. Setiap hari sekitar 17 ton dihasilkan dari rumah tangga, hotel, restoran, dan pabrik makanan (kiri) Biodiesel yang dihasilkan GEN Oil dari minyak jelantah telah digunakan oleh sejumlah nelayan untuk menggerakkan motor perahunya. (kanan atas)

Foto : Yusuf Ahmad/Yayasan BaKTI

Minyak Jelantah. Perwali ini dipercaya adalah satu-satunya Perwali tentang pengendalian minyak jelantah di Indonesia. Tujuan Perwali Makassar yang ditandatangani oleh Danny Pomanto ini adalah untuk mengendalikan peredaran dan penjualan minyak jelantah di masyarakat.

Adalah Andi Hilmi Mutawakkil dan timnya di GEN Oil (Garuda Energi Nusantara) mengubah minyak jelantah menjadi biodiesel yang kemudian didistribusikan ke nelayan di Pelabuhan Paotere sebagai alternatif bahan bakar perahu selain solar. Selama ini untuk proses pengolahannya menjadi biodiesel, GEN Oil menerima suplai bahan baku berupa minyak jelantah dari berbagai sumber dan dengan berbagai cara. Beberapa cara yang digunakan untuk memastikan bahan baku jelantah tetap ada yakni bekerjasama dengan mantan preman untuk mengumpulkan minyak jelantah dari restoran-restoran, kerjasama dengan pihak bank sampah sekolah-sekolah dan juga bank sampah



komunitas. Berbagai upaya dilakukan GEN Oil untuk lebih memastikan ketersediaan bahan baku biodieselnnya yang tak jarang disertai upaya-upaya edukasi dan penyadaran pula terkait bahaya minyak jelantah dan pemanfaatannya.

Pada 25 September 2019, Andi Hilmi Mutawakkil atau yang akrab disapa Hilmi menghadiri kegiatan *Business Gathering 2019* yang diadakan oleh Bank Indonesia di Hotel Rinra Makassar. *Gathering* ini menghadirkan para pemangku kepentingan di Sulsel, seperti pemerintah, perbankan, pelaku usaha, akademisi, serta mitra Bank Indonesia. Hadir sebagai pemandu dalam sesi diskusi adalah *Host* ternama Andy Noya. Di kesempatan ini, Hilmi yang mewakili GEN Oil mempresentasikan praktik cerdas pengolahan minyak jelantah menjadi biodiesel. Ia menjelaskan tentang kegiatannya dari berbagai perspektif isu seperti lingkungan, kesehatan, ekonomi dan sosial. Tak lupa Hilmi juga mengajak korporasi yang hadir untuk bersama-sama peduli terhadap isu lingkungan dan kesehatan dengan bergabung dan mendukung kegiatan GEN Oil.

Gayung bersambut, beberapa perusahaan yang hadir seperti PT. Pelindo, PT. Semen Tonasa

dan Bank Mandiri menyatakan ketertarikannya. Sebagai kelanjutan dari pertemuan tersebut, Bank Mandiri aktif berkomunikasi dengan GEN Oil guna mewujudkan kerjasama dan dukungannya.

Kerjasama antara Bank Mandiri dan GEN Oil diwujudkan dalam bentuk dukungan pendirian bank minyak jelantah yang akan menampung minyak-minyak bekas warga. Sebanyak tiga Bank Jelantah telah dibangun di Makassar. Dua unit dibangun di Jalan Rappocini dan satu unit jalan Kapasa Raya Daya.

Selama ini, tantangan dalam mendirikan Bank Jelantah salah satunya adalah terkait biaya pendirian. Untuk membuat 1 unit Bank Jelantah sederhana membutuhkan biaya kurang lebih 10 hingga 12 juta rupiah dan untuk yang lebih maju dilengkapi dengan peralatan yang lebih memadai membutuhkan biaya sekitar 15 sampai 16 juta rupiah.

Setiap Bank Jelantah didesain untuk mencakup wilayah Rukun Tetangga (RT) atau kurang lebih 100 kepala keluarga. Cakupan wilayah ini dipilih untuk memudahkan koordinasi mengingat jarak antar rumah yang lebih dekat.



**Kerjasama Bank Mandiri dan GEN Oil mendirikan bank minyak jelantah untuk menampung minyak bekas warga.**  
Foto : Dok. GEN Oil.

Bank Jelantah dilengkapi dengan sistem administrasi, peralatan dan perlengkapan seperti timbangan, corong, plang, saringan, jerigen, buku tabungan, brosur dan stiker. Setidaknya 20 buah jerigen berkapasitas 5 liter disiapkan di masing-masing bank untuk menampung minyak jelantah dari warga. GEN Oil akan datang mengambil bila 10 jerigen telah terisi penuh.

Dalam pengoperasian Bank Jelantah, GEN Oil melibatkan tokoh masyarakat, ibu-ibu PKK dan para pemilik toko bahan campuran. Sebelum beroperasi, pengurus Bank Jelantah terlebih dahulu diberikan pelatihan administrasi dan pengelolaan oleh GEN Oil. Karena memilih konsep bank, maka masyarakat yang menyetorkan jelantahnya disebut nasabah dan wajib memiliki buku tabungan.

Setiap kali menyetor minyak jelantah, pengurus akan mengkreditkan di buku tabungan. Untuk setiap 1,5 liter minyak jelantah yang disetor, nasabah berhak mendapatkan 1 cup atau 240 ml minyak baru seharga 3 ribu rupiah. Beberapa aturan tambahan dikenakan untuk

melatih kedisiplinan nasabah. Misalnya jika nasabah menghilangkan jerigen makan akan didenda dengan mendebet 10 ribu rupiah di tabungan.

Dalam kerjasama ini, nilai yang diperoleh dan ditawarkan kepada Bank Mandiri berupa *branding* (logo Bank Mandiri dicantumkan di beberapa bagian Bank Jelantah dan mural di sekitar bank), *engagement* dengan komunitas, dan partisipasi berkelanjutan. Selain itu stiker dengan logo Bank Mandiri juga terpasang di rumah-rumah warga nasabah Bank Jelantah selama 3 tahun dan di setiap jerigen. Melalui dukungan ini juga memudahkan Bank Mandiri untuk *engage* pada program selanjutnya dengan masyarakat misalnya untuk program literasi, pembinaan UMKM dan edukasi.

Selain mendukung pendirian Bank Jelantah, oleh Bank Mandiri dan GEN Oil di lingkungan sekitar bank juga dibuat mural dengan kampanye tema kesehatan diri dan lingkungan serta menyediakan ruang khusus pembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Total nilai total kerjasama pembangunan 3 Bank Jelantah dan pengembangan wilayah sekitarnya adalah kurang lebih 100 juta rupiah.

Bank Jelantah kerjasama Bank Mandiri dan GEN Oil telah diluncurkan pada tanggal 21 Desember 2019 di masing-masing lokasi. Masyarakat antusias dan menyambut baik kehadiran Bank Jelantah di wilayah mereka. Mereka berharap, kehadiran Bank Jelantah ini menjadi solusi untuk permasalahan limbah jelantah yang selama ini mereka hadapi. Harapannya akan ada banyak pihak-pihak lain baik swasta maupun komunitas yang turut ambil bagian dalam kegiatan Bank Jelantah bersama GEN Oil agar masalah kesehatan, sosial, lingkungan dan keterbatasan sumber energi terbarukan bisa teratasi.

Pengelolaan minyak jelantah menjadi biodiesel oleh GEN Oil dalam bentuk kewirausahaan sosial adalah salah satu praktik cerdas yang didokumentasikan dan dipromosikan BaKTI di panggung Festival Forum Kawasan Timur Indonesia VIII di Makassar tahun 2018.

#### **INFORMASI LEBIH LANJUT**

Untuk mendapatkan informasi tentang Praktik Cerdas BaKTI dapat menghubungi email: [info@bakti.or.id](mailto:info@bakti.or.id)



# Kolaborasi Mantap Sekber Asmat

Oleh  
**DESY MUTIALIM & SYAIFULLAH**

**P**uluhan ibu duduk dengan rapi di teras gereja, tidak jauh dari dermaga di Kampung Nakai, Distrik Pulau Tiga, Kabupaten Asmat. Sebagian besar ibu membawa anak-anak berusia empat tahun atau lebih muda. Tidak sedikit ibu yang datang membawa bayi. Suara anak-anak yang bermain bersahutan dengan suara bayi yang menangis. Sesekali ibu-ibu itu menenangkan anaknya, lalu kembali duduk menunggu saat dipanggil.

Hari pertama pelayanan pencairan dana BANGGA Papua di Distrik Pulau Tiga, salah satu titik pembayaran untuk melayani warga dari tujuh kampung di Distrik Pulau Tiga. Tujuh orang anggota Sekretariat Bersama (Sekber) Kabupaten Asmat bertugas hari itu. Dua orang petugas dari Bank Papua melayani penerima manfaat yang diperkirakan berjumlah 396 penerima manfaat.

Satu per satu ibu penerima manfaat program BANGGA Papua kemudian dipanggil. Di dalam gereja telah tersedia meja untuk melayani ibu-ibu



yang dipanggil berurutan berdasarkan kampung. Setiap ibu yang datang membawa map plastik berisi dokumen kependudukan seperti KTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran anak. Mereka yang sebelumnya telah menerima dana BANGGA Papua juga membawa buku tabungan yang diterima pada pencairan dana tahun 2018.

Salah satu syarat menerima dana BANGGA Papua adalah kepemilikan dokumen kependudukan. Ibu atau wali dari anak calon penerima manfaat harus memiliki KTP dan kartu keluarga. Tim pendataan BANGGA Papua yang bekerja sama dengan Dinas Dukcapil awalnya memang harus bekerja keras membantu ibu dan wali penerima manfaat mengurus KTP dan kartu keluarga mereka.

Kerja keras itu membuahkan hasil. Setelah pencairan dana BANGGA Papua pertama kali dilakukan pada tahun 2018 justru para ibu atau wali dari calon penerima manfaat yang mendatangi



**Proses pencairan dana BANGGA Papua oleh petugas pembayaran dari Bank Papua (kiri) Di titik-titik pembayaran, Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat memberikan layanan kesehatan kepada anak-anak penerima dana BANGGA Papua (kanan bawah)**  
Foto : Syaifullah/Yayasan BaKTI

kantor Sekber BANGGA Papua di Kabupaten Asmat untuk mendaftarkan diri dan mengurus kelengkapan dokumen kependudukan. “BANGGA Papua ini memang membantu sekali proses merapikan dokumen kependudukan,” Kata Marcellianus Yohanes, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Asmat, yang menjadi ketua rombongan tim pencairan dana di Distrik Pulau Tiga.

Hal senada disampaikan oleh Dewi Lingga Sari yang pernah menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt.) Dinas Dukcapil. “Berkat dukungan BANGGA Papua, kami sangat terbantu

meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan masyarakat,” ujar Dewi.

Saat pembayaran dilakukan pada Oktober 2019, ibu atau wali penerima manfaat datang ke tempat pembayaran dengan dokumen kependudukan yang sudah lengkap. Kelengkapan administrasi yang telah disiapkan membantu melancarkan proses verifikasi data di saat pencairan dana BANGGA Papua. Anggota Sekber tidak butuh waktu lama untuk melakukan verifikasi data para penerima manfaat.

Sangat berbeda dengan situasi pembayaran dana pertama BANGGA Papua di akhir Desember 2018. Saat itu, masih banyak ibu atau wali penerima manfaat yang masih belum mengerti tentang pentingnya kelengkapan dokumen kependudukan untuk menerima dana BANGGA Papua.

Dalam presentasinya di hadapan pejabat Bappenas dan Kedutaan Australia yang berkunjung ke Asmat beberapa waktu lalu, Ketua Sekber BANGGA Papua Kabupaten Asmat juga menyampaikan bahwa BANGGA Papua ikut meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kelengkapan dokumen kependudukan “Ini dibuktikan dengan makin banyaknya warga yang datang ke Sekber untuk mengurus Akta Kelahiran,” jelas Ketua Sekber Asmat waktu itu, Frans Sinurat.

“Dengan adanya Program BANGGA Papua, sa pu masyarakat di dalam kampung ini su banyak yang punya kartu keluarga dan akta lahir anak,” ujar Willy Brodus, Kepala Kampung Agats. Pembinaan dokumen kependudukan di Kabupaten Asmat ini memang menjadi salah satu praktik baik dari pelaksanaan Program BANGGA Papua di kabupaten itu.

### **Mendekatkan Layanan Kesehatan kepada Masyarakat**

Di sisi lain halaman depan gereja itu, empat orang perempuan berseragam putih sibuk menemani ibu-ibu penerima manfaat yang baru saja menerima dana BANGGA Papua. Sekber Asmat memang sudah menata alur pencairan dana, sehingga semua ibu yang telah menerima dana akan diarahkan ke bagian edukasi pemanfaatan dana yang berada di depan gereja. Di sana, para petugas kesehatan dari Puskesmas Nakai mengingatkan kembali tentang pentingnya gizi bagi anak dan apa saja yang bisa dilakukan oleh ibu atau wali untuk menjaga gizi dan kesehatan anak-anaknya. Mereka juga



mengulang pesan tentang jenis barang apa saja yang harus dibeli dengan menggunakan dana BANGGA Papua dan barang apa saja yang tidak boleh dibeli dengan dana BANGGA Papua.

Tetapi bukan hanya itu yang menarik adalah, para petugas kesehatan itu sekalian juga memberikan layanan kesehatan bagi ibu dan anak penerima manfaat BANGGA Papua. Mulai dari pemberian imunisasi, penimbangan berat badan, deteksi dini ancaman *stunting* pada anak, hingga pemberian obat cacic dan kaki gajah bagi para ibu atau wali. Sekali mengayuh dayung, dua tiga pulau terlampaui.

“Biasanya kita susah ketemu mereka. Kalau kita ke kampung, mereka kan biasanya di hutan. Anak-anak juga dibawa,” kata Matea Yyongarut, salah satu suster yang bertugas di Puskesmas Nakai. “Makanya, mumpung sekarang mereka berkumpul, sekalian saja kita kasih layanan kesehatan,” sambungnya lagi.

Ini memang strategi jitu petugas kesehatan dan Sekber Asmat. Bayangkan, ada ribuan ibu dan anak yang datang ke titik pembayaran dana BANGGA Papua. Ini merupakan kesempatan emas untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan layanan kesehatan sebagaimana mestinya.



Kesibukan anggota Sekber melayani para penerima manfaat saat pencairan dana BANGGA Papua (kiri atas) Kepala Kampung sosialisasi penggunaan dana dengan bahasa lokal (kiri bawah) Memberikan layanan informasi bagi masyarakat penerima manfaat (kanan atas) Selain untuk memonitor pertumbuhan anak, petugas kesehatan juga membagikan obat cacing dan kaki gajah pada mama-mama (kanan bawah)  
Foto : Syaifullah/Yayasan BaKTI

Jumlah ibu atau wali penerima manfaat di Asmat per Juni 2019 tercatat 11.402 orang, sementara jumlah anak penerima manfaat ada 16.209 anak. Melihat data ini, layanan kesehatan kepada ibu dan anak dapat dilakukan secara masif ketika mereka datang ke titik pembayaran untuk menerima dana BANGGA Papua.

#### Dukungan Bupati Asmat untuk Kolaborasi

Kolaborasi ini memang sudah direncanakan dengan baik oleh Sekber Asmat, seperti yang diutarakan oleh Frans Sinurat, Kepala BKAD Kabupaten Asmat, yang juga mantan Ketua Sekber Kabupaten Asmat.

“Kolaborasi seperti inilah yang kita harapkan. Jadi Dinas Dukcapil dimudahkan bisa memperbaiki data kependudukan. Petugas kesehatan juga bisa

melakukan layanan kesehatan karena mumpung warga bisa berkumpul di satu tempat,” ujar Frans.

Sekber Asmat juga gencar memfasilitasi kerjasama antar dinas di kabupatennya. Dukungan langsung, tegas dan berkelanjutan yang diberikan Bupati Asmat, Elisa Kambu, sangat menguatkan ikatan antar dinas untuk bersama-sama memastikan keberhasilan Program BANGGA Papua di Asmat.

Sosialisasi tentang program BANGGA Papua diberikan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Asmat. Setelah itu, sosialisasi BANGGA Papua juga dimandatkan untuk disampaikan oleh OPD-OPD tersebut, ketika mereka turun ke distrik dan kampung. Sosialisasi BANGGA Papua juga diselipkan dalam agenda Musrenbang kampung dan distrik. Penugasan-penugasan seperti ini dikuatkan oleh Bupati Asmat melalui aturan-aturan yang dikeluarkannya.

Bersama Sekber Asmat, Elisa Kambu bahkan sering turun langsung ke distrik-distrik dan titik-titik pembayaran untuk mensosialisasikan tentang Program BANGGA Papua dan mengedukasi masyarakatnya tentang manfaat dana yang diberikan. Peran sertanya yang langsung ini tentu memberikan semangat besar kepada seluruh jajaran pelaksana program di kabupatennya.

Setelah uji coba dilakukan selama satu tahun di Asmat, BANGGA Papua memang terlihat memberikan dampak positif bagi kabupaten tersebut. Pertama, kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi dan kesehatan anak meningkat. Kedua, makin banyak masyarakat di Asmat yang memiliki dokumen kependudukan. Pencatatan kependudukan di Asmat juga menjadi makin rapi dan lebih akurat. Ketiga, ibu dan anak di Asmat menerima layanan kesehatan dari petugas kesehatan dan keempat, kerjasama lintas sektor antar OPD di Kabupaten Asmat juga menjadi lebih baik.

Sekber Asmat telah menginisiasi sebuah kolaborasi yang melahirkan kebiasaan dan cara pikir baru untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Asmat dan memajukan masa depan Kabupaten Asmat.

#### INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program BANGGA Papua, dapat menghubungi [info@bakti.or.id](mailto:info@bakti.or.id)

# KEGUNUNGAN, MENGGUGAT SDGs

Oleh **A. M. SALLATU**

**A**pakah wilayah gunung dan pegunungan adalah tergolong sumberdaya alam di tanah air? Tentu saja terlalu naif untuk menyangkalnya. Tetapi potensi sebagai sumberdaya alam gunung lebih banyak disubordinasikan pada hutan. Kehutanan lebih banyak menjadi perhatian dibandingkan dengan kegunungan. Bahkan terkesan memanfaatkan potensi gunung dan menjaga ekosistem hutan, secara implisit sudah memberi perhatian pada gunung. Memang tidak semua hutan terpaut dengan gunung, tetapi gunung akan selalu terpaut dengan hutan yang melekat





Foto: Ihsan Djunaed/Yayasan BaKTI

**Wilayah gunung merupakan wilayah yang didiami oleh manusia, dan manusia inilah yang biasanya memanfaatkan, merambah dan merusak hutan, disamping penikmat dan pelaku ekonomi berskala.**

padanya. Tidak berarti permasalahan kegunungan sepenuhnya dapat tertangani hanya dengan memberi perhatian pada aspek dan dimensi pengelolaan kehutanannya.

Kegunungan dan kehutanan pada prinsipnya adalah dua sisi dari satu mata uang logam. Menjaga kelestarian ekosistem hutan tidak secara otomatis bisa menjaga kelestarian ekosistem gunung. Sebaliknya, bila mampu memperhatikan dan memelihara ekosistem gunung, maka dapat dipastikan ada sebagian ekosistem hutan dapat terpelihara. Oleh karena itu, tidak berlebihan bila disimpulkan bahwa justru lebih arif mengedepankan perhatian dan kelestarian ekosistem gunung sebagai tempat kedudukan keberadaan hutan.

Kegunungan, dengan demikian sepatutnya menjadi pengantar bahasan kehutanan, dimana keduanya hadir secara bersama dan bersandingan. Kegunungan bukan subyek yang implisit dalam subyek kehutanan. Bahkan lebih dari itu, sebenarnya hadir pula ekosistem sungai yang lebih ditonjolkan dengan DAS (Daerah Aliran Sungai) sebagai subyek kesungai.

Wilayah gunung merupakan wilayah yang didiami oleh manusia, dan manusia inilah yang biasanya memanfaatkan, merambah dan merusak hutan, disamping penikmat dan pelaku ekonomi berskala. Dengan demikian gunung dan manusia adalah dua ekosistem yang juga sepatutnya dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terpadu, disamping ekosistem-ekosistem lainnya.



Foto: Yusuf Ahmad/Yayasan BaKTI

Dengan suatu catatan bahwa manusia tidak terlepas dari sistem kelembagaan dalam kehidupan sosialnya. Karena itu pada dasarnya terdapat lima pilar ekosistem pada wilayah pegunungan. Kelima pilar ini yang sepatutnya menjadi sorotan perhatian yang padu dan terintegrasi untuk mencermati wilayah pegunungan Bawakaraeng misalnya.

Belajar dari analisis sistem sosial, dalam kerangka *Participatory Local Social Development*, (PLSD), kelima pilar pegunungan yang dimaksud diatas (gunung, hutan, sungai, manusia dan kelembagaan sosial) akan dapat berfungsi secara optimal memberi kemanfaatan hanya bila terdapat keseimbangan ekosistem dari kelimanya. Ketidakseimbangan yang terjadi justru yang akan mengakibatkan kerusakan ekosistem masing-masing ataupun secara bersama-sama baik secara alamiah maupun karena tindakan manusia. Dapat dikatakan bahwa hal tersebut terjadi, pada prinsipnya berawal dari perlakuan yang memisah-misahkan cara pandang kelima pilar ini.

Bila dihayati, kelima pilar ini diciptakan oleh Maha Pencipta dengan konsep yang harmoni

untuk saling mendukung dan mengembangkan kehidupan yang lestari. Oleh karena itu bila salah satu diantaranya lebih unggul dan diunggulkan, maka yang akan terjadi adalah dampak negatifnya pada ekosistem masing-masing atau secara bersama-sama. Dapat dipastikan bahwa manusia lah yang paling awal sebagai sumber utama penyebabnya, baik yang mendiami wilayah pegunungan maupun pemanfaat yang datang.

Dalam teori sistem sosial, disetiap pemukiman manusia hadir apa yang disebut *societal system*. Karena itu, menjadi pertanyaan seperti apa *societal system* yang ada atau yang pernah ada di wilayah pegunungan Bawakaraeng? Hal ini perlu ditemukan atau diidentifikasi sebagai bahan kajian awal. Nyaris pasti *inner system* (rumah tangga dan komunitas lokal, H/H dan L/C dalam konsep PLSD) pada *societal system* yang ada atau yang pernah ada di wilayah pegunungan Bawakaraeng seharusnya menjadi acuan dan sekaligus tumpuan segenap upaya pelestarian ekosistemnya.

Suka atau tidak suka, manusia dan kelembagaan sosialnya sepatutnya menjadi tempat berangkat berpikir sebelum melangkah

## **Bagaikan wabah penyakit, *developmentalism* ini di satu sisi memerlukan upaya pengobatan tapi di lain sisi juga tetap dibutuhkan upaya pencegahan. Pengobatan dan pencegahan harus lebih banyak diarahkan pada manusianya. Hal ini yang membutuhkan kerangka rencana aksi.**

lebih jauh dalam mencermati permasalahan wilayah pegunungan Bawakaraeng. Memang bisa dipahami bahwa kehadiran paham pembangunan atau yang lebih dikenal dengan istilah *developmentalism* telah membawa godaan yang sangat besar baik bagi manusia yang mendiami maupun yang datang ke wilayah pegunungan Bawakaraeng. Namun bagaikan wabah penyakit, *developmentalism* ini di satu sisi memerlukan upaya pengobatan tapi di lain sisi juga tetap dibutuhkan upaya pencegahan. Pengobatan dan pencegahan harus lebih banyak diarahkan pada manusianya. Hal ini yang membutuhkan kerangka rencana aksi.

Pertanyaan lanjutnya adalah, siapa yang akan berperan? Atau, pertanyaan lebih spesifik, apa peran yang bisa dimainkan oleh para pencinta alam? Secara global, dan Indonesia pun sudah berkomitmen untuk berperan nyata dan aktif dalam mencapai SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yang memiliki empat pilar dan 17 tujuan, sebagaimana tercermin dalam RPJMN 2014-2019. Namun bila dicermati dimensi kegunungan tidak disebutkan secara eksplisit, kecuali secara implisit dianggap bisa terkait.

Dimensi kegunungan pada dasarnya berkenaan dengan keempat pilar TPB dan akan bersentuhan dengan setidaknya delapan *goals* TPB. Dengan demikian menjadi tantangan sekaligus peluang saat ini adalah membunyikan dimensi kegunungan dalam RPJMN 2020-2024, yang tidak lama lagi akan ditetapkan. Permasalahan wilayah pegunungan, dapat dikatakan nyaris bersifat seragam pada skala nasional. Dalam arti, apa yang terjadi di wilayah pegunungan Bawakaraeng tidak bersifat unik, terlepas bahwa memiliki spesifikasinya sendiri. Nampaknya peran nyata jejaring pencinta alam, setidaknya sebagai katalisator, menjadi penting dan berkepentingan untuk membunyikannya.

Haruskah menunggu terlebih dahulu dituangkan dalam RPJMN baru selanjutnya melakukan rencana aksi? Tidak perlu. Dewasa ini sudah tersedia skema dukungan untuk TPB melalui kelembagaan filantropi di tanah air. Artinya, peluang untuk berbuat sudah tersedia, tinggal bagaimana mempersiapkan dan menyusun seperangkat rencana aksi yang valid, akuntabel dan mampu dilaksanakan. Menghadirkan rencana aksi, tentu bukan hal yang mudah dan sederhana, apalagi membutuhkan ketekunan dalam memanfaatkan pendekatan keilmuan yang mumpuni. Tetapi semua ini hanyalah persoalan tekad dan kemauan untuk dapat menunaikannya.

Pertanyaan akhirnya, saat ini dibutuhkan pemetaan menuju rencana aksi, yaitu apa dan oleh siapa? Cara pandang dan rumusan kegiatan yang perlu dipetakan antara lain; bagaimana melembagakan kegiatan terutama untuk mengelola dan memvisualisasikan data serta informasi yang dibutuhkan, mendorong kajian antropologi kependudukan, mengajukan *share vision*, menggalang komitmen dan dukungan kerjasama pihak pemerintah daerah, menggerakkan persiapan sosial menuju terbentuknya kapasitas swatantra (*Self Organizing Capacity*) di tengah masyarakat melalui pendekatan PLSD, agar pada akhirnya mampu menawarkan seperangkat rencana aksi.

Sebagai penutup, pengabdian pada masyarakat berkelanjutan menjadi niscaya bagi wilayah pegunungan Bawakaraeng. Untuk itu, para pencinta alam perlu segera berjejaring dan memanfaatkan skema dukungan filantropi yang tersedia. Mungkinkah? Hanya akan mungkin bila sejatinya wawasan dasarnya adalah kebutuhan, bukan sekadar keinginan.

### **INFORMASI LEBIH LANJUT**

Penulis adalah Koordinator Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia (JKTI) dapat dihubungi melalui email [madjid76@gmail.com](mailto:madjid76@gmail.com)



# Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Oleh  
**MUTMAINNAH BAHRI**

**P**erempuan (di) Makassar melakukan sebuah survei terhadap 112 responden di kota Makassar tentang kekerasan terhadap perempuan pada November 2019 lalu. Hasil survei menemukan bahwa hanya 51,6 persen dari total responden yang mengetahui apa itu kekerasan berbasis gender dalam bentuk fisik, psikologis, dan seksual. Sebagian besar responden juga belum memahami apa saja penyebab kekerasan berbasis gender dan bagaimana menyikapinya.

Perempuan (di) Makassar adalah sebuah komunitas yang dibentuk oleh beberapa perempuan alumni program *leadership* YSEALI yang mendapat kesempatan belajar tentang pemberdayaan ekonomi, isu-isu perempuan, disabilitas, pendidikan, dan



kekerasan. Seluruh peserta tampak antusias membahas definisi kekerasan serta contoh-contoh kekerasan yang dialami dan ditemui di sekitar mereka.

Dalam diskusi, tercermin sejauh mana pengetahuan peserta tentang kekerasan, jenis-jenis kekerasan, tindakan pencegahan dan pemulihan korban adalah hal yang perlu dipahami oleh semua orang. Semua peserta diskusi sependapat bahwa kekerasan dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Dalam hal ini, perempuan dan anak menjadi kelompok yang paling rentan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak utamanya kekerasan fisik dan seksual yang tidak jarang dilakukan oleh orang terdekat. Kasus-kasus seperti ini pada umumnya tidak dilaporkan atau diselesaikan dengan langkah damai.

Pertanyaan menarik yang muncul dalam diskusi adalah jika

lingkungan di beberapa institusi dan kampus di Amerika Serikat.

Menyikapi hasil survei tersebut di atas, sebuah diskusi bertajuk Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak diinisiasi oleh Perempuan (di) Makassar bekerja sama dengan Yayasan BaKTI. Diskusi yang diadakan pada 7 Desember 2019 diselenggarakan sebagai upaya memberi pemahaman tentang beragam bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak serta langkah preventif untuk mencegahnya.

Tak kurang dari 50 peserta yang sebagian besar adalah perempuan memadati ruang pertemuan sore itu. Mereka yang hadir saat itu adalah ibu rumah tangga, mahasiswa, dosen, staf pemerintah, dan perwakilan dari beberapa lembaga lokal.

Diskusi diawali dengan pemaparan hasil survei dilanjutkan dengan diskusi kelompok yang membahas lebih mendalam tentang kategori

kebanyakan pelaku adalah orang terdekat, lantas di mana tempat yang aman bagi perempuan?

Ibu Lusi Palulungan, Program Manager MAMPU-BaKTI mengawali diskusi dengan pertanyaan tentang mengapa kekerasan terhadap perempuan paling banyak dibicarakan? Bukankah laki-laki juga mengalami kekerasan? Beliau mengungkapkan bahwa dalam kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga misalnya ada keengganan dan pertimbangan panjang oleh perempuan untuk melaporkan kekerasan yang dialami, apalagi jika pelaku kekerasan adalah suami yang menjadi pencari nafkah keluarga. Hal tersebut dapat diperparah dengan anggapan dan label negatif dari keluarga dan sekitar.

Tindakan pencegahan adalah langkah terbaik yang perlu dilakukan untuk mengakhiri kekerasan. Ketika kekerasan terjadi, ada banyak masalah yang



Foto-foto: Dok. Perempuan (di) Makassar

kemudian muncul setelahnya. Kekerasan tidak seketika berakhir saat pelaku ditangkap dan dipenjarakan, akan tetapi ada proses pemulihan yang membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit untuk membantu korban kembali menjalani hidup dengan baik.

Perempuan korban kekerasan seksual misalnya, harus melewati beberapa fase pemulihan yang tidak mudah. Dimulai dari pemulihan fisik, trauma psikis, hingga tahap penerimaan terhadap diri sendiri dan lingkungan. Tidak ada korban yang dapat benar-benar sembuh. Prosesnya tidak semudah itu. Terkadang korban justru mengalami ketidakadilan seperti pengucilan di masyarakat dan pemberian label-label negatif.

Hal senada juga diungkapkan aktivis perempuan yang juga Presidium Nasional Koalisi Perempuan Indonesia, Ibu Husaema Husain. Beliau mengatakan bahwa negara wajib hadir melindungi perempuan dari tindak kekerasan. Tidak ada satu pun perempuan yang boleh menerima kekerasan. Seringkali kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak utamanya kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai hal yang lumrah dan merupakan persoalan pribadi. Hal tersebut yang kerap kali membatasi korban untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialami dan memilih mendiamkan kekerasan yang dialami.

Diskusi diakhiri dengan komitmen untuk bergerak bersama, tidak tinggal diam dan melaporkan kekerasan yang terjadi di sekitar. Ada beberapa organisasi yang menyediakan layanan pengaduan dan pendampingan untuk korban kekerasan serta fasilitas Shelter Warga yang dapat menjadi tempat penanganan dan perlindungan awal untuk persoalan kekerasan yang menimpa perempuan dan anak.

Selain itu, mengupayakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan dan anak sangat diperlukan. Memberikan dukungan dan tidak menyalahkan serta menyudutkan korban juga salah satu upaya yang dapat membantu korban keluar dari lingkaran kekerasan.

Hal yang tidak kalah penting adalah pembekalan pengetahuan sejak dini melalui pola pengasuhan di keluarga. Perlunya pemahaman awal tentang kekerasan akan berdampak terhadap pengurangan jumlah kasus kekerasan.

Dengan langkah bersama dan komitmen dalam upaya mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, kita membantu perempuan dan anak mendapatkan hidup yang lebih baik.

#### INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis Penggagas Komunitas Perempuan (di) Makassar dan dapat dihubungi melalui email [perempuandimakassar@gmail.com](mailto:perempuandimakassar@gmail.com)

# KB Pria Berpartisipasi dalam Penanganan *Stunting*



Ilustrasi: Ichsan Djunaed/Yayasan BaKTI

Oleh **SUMARNI ARIANTO**

**D**ata menunjukkan bahwa di Indonesia 1 dari 3 anak di bawah usia 5 tahun mengalami *stunting*. *Stunting* adalah pertumbuhan fisik dan kognisi yang kurang optimal akibat kurang gizi sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun. Berdasarkan data ini, Indonesia berada di urutan ke 5 negara dengan angka *stunting* tertinggi di dunia.

Untuk itu, *stunting* menjadi salah satu perhatian serius Pemerintah Republik Indonesia tak terkecuali Desa Arakan, Kecamatan Tatapan, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara terdapat 5 kasus *stunting*. Kemiskinan masih menjadi faktor penyebab utama. Hal inilah yang menggerakkan Pak Ismail Husen bersama Swara Parangpuang Sulawesi

Utara untuk mencari jalan agar persoalan *stunting* di Desa Arakan dapat diatasi.

Dengan berbekal pengetahuan dan informasi tentang *stunting* dari pelatihan sebelumnya yang diadakan oleh Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) di Jakarta, Pak Ismail giat berdiskusi dengan beberapa pihak terkait, seperti kepala desa dan Dinas Kesehatan Minahasa Selatan.

Pak Ismail Husen sehari-hari bekerja di lembaga Swara Parangpungan, organisasi non pemerintah yang menangani persoalan perempuan dan anak. Ia juga adalah akseptor sekaligus pegiat KB Pria vasektomi di Sulawesi Utara. Sejak tahun 2007 ia menjalani kontrasepsi yang selama ini selalu dianggap sebagai tanggung jawab perempuan. Selain sukses berKB ia juga sukses mengajak banyak bapak-bapak untuk ikut berperan dalam program KB ini, hal ini terbukti dengan semakin banyaknya akseptor KB pria di Sulawesi Utara. Di Desa Arakan terdapat 77 orang yang bervasektomi.

Dari beberapa kali diskusi dengan kepala desa dan dinas kesehatan, terbersitlah ide untuk melibatkan bapak-bapak dalam isu *stunting* dan kesehatan ibu dan anak. “Seharusnya persoalan *stunting* menjadi perhatian semua karena *stunting* disebabkan faktor multidimensi yang membutuhkan peran semua pihak termasuk bapak-bapak” ungkap bapak dengan 5 anak ini.

Pak Ismail kemudian mengutarakan kekhawatirannya terkait isu *stunting* kepada Dinas Kesehatan Minahasa Selatan. Pada pertemuan ini Pak Ismail mengutarakan potensi untuk melibatkan bapak-bapak peserta KB Pria sebagai agen informasi *stunting*, namun belum menemukan titik masuk dimana mereka bisa dilibatkan. Dinas kesehatan menyambut positif



## Seharusnya persoalan *stunting* menjadi perhatian semua karena *stunting* disebabkan faktor multidimensi yang membutuhkan peran semua pihak termasuk bapak-bapak”

dan mengusulkan untuk melibatkan bapak-bapak tersebut di kegiatan Posyandu yang rutin dilaksanakan setiap bulan.

Setelah berdiskusi beberapa kali, kemudian disepakati untuk melibatkan bapak-bapak di bagian pendaftaran dan bagian menimbang bayi dulu, karena pengetahuan di bagian ini relatif mudah dan cepat diajarkan. Kegiatan Posyandu rutin dilaksanakan setiap bulan, namun selama ini hanya dilaksanakan oleh kader kesehatan perempuan saja.

Sebagai langkah awal, dengan berkoordinasi dengan kepala desa, Pak Ismail kemudian melakukan kegiatan diskusi pada September 2019 di dua desa yakni di Desa Arakan, desa nelayan



Foto-foto: Ismail Husen

testimoni atau berbagi pengalaman sebagai peserta KB pria.

Selain di desa Pak Ismail, diskusi juga dilaksanakan di Desa Pungkol. Desa Pungkol dan Desa Arakan berada di Kecamatan Tatapan, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Di desa yang mayoritas bapak-bapaknya tergabung dalam kelompok tani ini, tantangan di desa ini masih berat, selain masih kuatnya budaya patriarki juga karena alasan agama yang menurut mereka tidak membolehkan. Saat kegiatan

sosialisasi tentang *stunting* diikuti kurang lebih 22 orang yang terdiri dari bapak-bapak 14 orang dan dan ibu-ibu 7 orang.

Pada kegiatan Posyandu pada November lalu di Desa Arakan. Sebanyak 3 orang bapak yang telah dibekali dengan pengetahuan tentang *stunting*, cara pencatatan pendaftaran dan penimbangan akan mulai bertugas. Harapannya dengan terlibatnya juga bapak-bapak dalam kegiatan terkait kesehatan ibu dan anak bisa berkontribusi pada pencegahan dan penanganan isu *stunting*.

Kesehatan ibu dan anak termasuk *stunting* dan kontrasepsi bukan hanya kewajiban salah satu pihak, baik pria maupun perempuan punya kewajiban yang sama. BerKB bukan tanggung jawab perempuan saja tetapi laki-laki harus ambil peran. Peran ini kemudian yang dilakukan oleh para peserta KB Pria di Sulawesi Utara.

KB Pria adalah salah satu praktik cerdas dari Sulawesi Utara yang dipromosikan BaKTI pada tahun 2009 dalam Festival Forum Kawasan Timur Indonesia ke IV.

#### INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Praktik Cerdas BaKTI ini, anda dapat menghubungi [info@bakti.or.id](mailto:info@bakti.or.id)

tempat Pak Ismail tinggal dan juga Desa Pungkol. Pada pertemuan pertama di Desa Arakan, diskusi *stunting* dihadiri oleh 38 orang bapak-bapak yang semuanya adalah peserta KB Pria.

Dalam pertemuan ini dijelaskan tentang pentingnya peran ayah dalam pola asuh yang baik untuk nutrisi anak dan pengetahuan mengenai nutrisi ibu hamil guna mencegah *stunting*, termasuk dijelaskan pula tentang apa itu *stunting*, penyebab dan bagaimana cara pencegahan serta penanganannya. Mereka diajak untuk peduli isu *stunting* ini dengan turut serta di kegiatan rutin Posyandu. Awalnya mereka menolak, karena mereka berpendapat bahwa kegiatan Posyandu adalah kegiatan ibu-ibu, namun setelah diyakinkan bahwa urusan kesehatan anak adalah urusan bersama antara ayah dan ibu, mereka kemudian bersedia.

Sebagai awal, nantinya mereka diberi tugas di meja pendaftaran dan penimbangan saja. Sementara itu, Pak Ismail yang bertugas memberi penyuluhan terkait *stunting* dan tentunya juga KB Pria. Saat beliau bercerita tentang KB, bapak-bapak yang tadinya bertugas di bagian pendaftaran dan penimbangan akan diminta untuk memberikan

# Daya Saing Sulawesi Selatan

Oleh **SYAHRIL**

**B**aru-baru ini, Badan Pusat Statistik merilis data terbaru tentang pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan. Di tengah masalah politik (hak angket) yang memanas antara DPRD dan Gubernur, BPS mengumumkan secara resmi valuasi ekonomi Sulawesi Selatan pada kuartal II tahun 2019 mencapai Rp245,14 triliun atas dasar harga berlaku dan Rp160,81 triliun berdasarkan harga konstan.

Itu berarti ekonomi Sulawesi Selatan triwulan II-2019 dikomparasi dengan triwulan II-2018 tumbuh 7,46 persen. Ini menjadi kabar baik bagi masyarakat Sulawesi Selatan secara umum dan pelaku usaha secara spesifik, sebab kenaikan pertumbuhan ekonomi terjadi di tengah rendahnya daya serap anggaran dan kekisruhan politik yang sepertinya belum akan selesai dalam waktu dekat.

Tumbuhnya ekonomi Sulawesi Selatan di tengah masalah tata kelola pemerintahan sehingga berdampak pada rendahnya daya serap anggaran harusnya dilihat dalam satu kerangka pikir yang utuh, yaitu daya saing.

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan kuartal II tahun 2019 lebih dominan digerakkan oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi. Sektor yang tanpa intervensi pemerintah akan bergerak secara mandiri karena tingginya permintaan masyarakat Sulawesi Selatan, terutama Kota Makassar.

Pesatnya pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi Sulawesi Selatan dapat dilihat dari tingginya penetrasi penggunaan internet, di mana rata-rata setiap penduduk Sulawesi Selatan memiliki dua gawai yang terhubung dengan internet (Bank Indonesia, 2019).



Hal tersebut berarti sektor ini digerakkan oleh kekuatan permintaan dan penawaran, bukan intervensi pemerintah daerah. Jikapun ada, sangat terbatas karena penyedia layanannya adalah pihak swasta.

Tapi, buruknya tata kelola pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan, jika dibiarkan tanpa solusi, justru dikhawatirkan akan memperburuk kinerja semua lapangan usaha, sebab implikasi tata kelola pemerintahan adalah kepastian dan perlindungan dalam melakukan aktivitas bisnis.

Masalah tata kelola pemerintahan daerah hanya satu dari banyak indikator daya saing daerah yang dirumuskan oleh



Ilustrasi: Ichsan Djunaed/Yayasan BaKTI

*Asia Competitiveness Institute (ACI) Lee Kuan Yew School of Public Policy National University of Singapore* dan secara rutin dipublikasi dengan judul Analisis Daya Saing Provinsi-Provinsi di Indonesia.

Tahun 2019, ACI kembali merilis hasil survei daya saing dan Universitas Hasanuddin dipilih sebagai salah satu host. Terpilihnya Universitas Hasanuddin sebagai tuan rumah diseminasi hasil survei sangat mungkin berkaitan dengan penurunan performa daya saing Sulawesi Selatan.

Perhitungan indeks daya saing pertama kali dipopulerkan oleh *World Economic Forum* pada tahun 2004, bertujuan untuk mengetahui posisi daya saing setiap negara di dunia. TCI Network membagi definisi daya saing berdasarkan

tingkatannya, yaitu level perusahaan, industri, dan negara.

Pada level perusahaan, daya saing diartikan sebagai kemampuan memproduksi barang atau jasa dengan cara yang lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan para kompetitor. Salah satu konteksnya adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan inovasi dalam memproduksi produk yang relatif lebih baik daripada kompetitor dengan harga jual bersaing.

Pada level industri, daya saing didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan-perusahaan dalam suatu negara untuk bisa memenangkan persaingan melawan perusahaan-perusahaan dari negara lain.

Daya saing berkaitan dengan negara atau daerah menggunakan definisi kemampuan

masyarakat untuk meraih standar hidup yang lebih tinggi dibandingkan penduduk negara atau daerah lain. Standar hidup yang tinggi salah satunya diukur dari kemampuan penduduk menghasilkan barang dan jasa (produktivitas).

Dalam publikasinya, ACI melakukan pemeringkatan daya saing 34 provinsi di Indonesia berdasarkan skor 105 indikator dan diperoleh dari hasil responden yang terdiri dari pengusaha, akademisi, dan pemerintah daerah. Total respondennya secara nasional tahun 2019 mencapai lebih dari 2.500 dan rata-rata 75 responden untuk setiap provinsi.

Berdasarkan survei daya saing tersebut, Provinsi Sulawesi Selatan termasuk salah satu daerah yang kinerja daya saingnya terus menurun sejak pertama kali dilakukan survei tahun 2016.

Saat pertama kali disurvei, daya saing Sulawesi Selatan berada pada peringkat 6 dari 33 provinsi, kemudian turun ke peringkat 8 pada tahun 2017. Bukannya membaik, posisi daya saing Sulawesi Selatan justru memburuk karena menurun ke peringkat 10 tahun 2017 dan tahun 2019 berada pada posisi 16.

Tahun 2019, daya saing Sulawesi Selatan tertinggal dari dua provinsi lain di Pulau Sulawesi, yaitu Sulawesi Tengah pada peringkat 14 dan Gorontalo di peringkat 15, dan hanya berbeda satu peringkat dari Provinsi Sulawesi Utara yang berada di urutan 17.

Rendahnya indeks daya saing Sulawesi Selatan dipicu oleh menurunnya kinerja tiga dimensi utama daya saing, yaitu stabilitas ekonomi makro dari peringkat 11 tahun 2018 ke 12 tahun 2019, pemerintahan dan institusi publik yang sebelumnya berada di peringkat 11 menjadi 14, serta kondisi finansial, bisnis, dan tenaga kerja yang sebelumnya peringkat 14 menjadi 21.

Hanya dimensi kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur yang mengalami perbaikan peringkat di Sulawesi Selatan, dari peringkat 14 tahun 2018 menjadi urutan 11 tahun 2019.

Pertumbuhan ekonomi masuk sebagai salah satu indikator stabilitas ekonomi makro dan tata kelola pemerintahan merupakan salah satu parameter dimensi pemerintahan dan institusi publik. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang impresif dalam beberapa tahun terakhir belum mampu memperbaiki peringkat dimensi stabilitas ekonomi makro sebab beberapa

indikator lainya tidak lebih baik dari angka pertumbuhan.

Sebaliknya, buruknya tata kelola pemerintahan daerah di Sulawesi Selatan memengaruhi peringkat dimensi pemerintahan dan institusi publik. Itu sebabnya peringkatnya jeblok dari 11 ke 14.

Penurunan peringkat lebih parah terjadi pada dimensi kondisi finansial, bisnis, dan tenaga kerja. Ini menjelaskan bahwa, di Provinsi Sulawesi Selatan, aktivitas bisnis cenderung tidak efisien, pasar tenaga kerjanya tidak fleksibel, dan kinerja produktivitasnya buruk.

Tapi, Sulawesi Selatan perlu mendapat apresiasi pada perbaikan peringkat dimensi kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur. Ini menggambarkan bahwa kualitas hidup dan kondisi infrastruktur, khususnya fisik dan teknologi di Sulawesi Selatan mengalami perubahan positif.

Jika dilihat per indikator, ACI mengidentifikasi 20 persen indikator yang memperkuat daya saing Sulawesi Selatan, tapi juga mengidentifikasi 20 persen indikator paling lemah.

Lima indikator paling kuat dari 20 persen indikator adalah tingkat penyelesaian kriminalitas dalam hal dimensi pemerintahan dan insitusi publik, akses internet di sekolah terkait dimensi kualitas hidup dan infrastuktur, pertumbuhan PDRB untuk stabilitas ekonomi makro, evaluasi kinerja pemerintah daerah dan ekspektasi serta perkembangan pemerintah daerah terkait dimensi pemerintahan dan insitusi publik.

Sementara lima indikator paling lemah dalam daya saing Sulawesi Selatan adalah koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota (peringkat 105), rasio gini (peringkat 104), tingkat partisipasi angkatan kerja (peringkat 103), pertumbuhan penduduk (peringkat 102), dan kapasitas sumber daya manusia di perusahaan (101).

Kelima indikator paling lemah sekaligus menggambarkan kondisi masyarakat Sulawesi Selatan yang tata kelola pemerintahnya buruk, ekonominya timpang, dan tertinggal kualitas sumber daya manusianya dari provinsi-provinsi lain di Indonesia.

#### INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah peneliti. Artikel Artikel bersumber dari Qureta.com  
<https://www.quireta.com/post/daya-saing-sulawesi-selatan>



Foto: Taufan Ramli/Vayasan BAKTI

# Perkawinan Bukan Kepentingan Anak

Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Perubahan Undang-Undang UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) mengubah batas minimal menikah baik laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal di usia 19 tahun. Sebelumnya, batas usia menikah bagi laki-laki ialah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Karena batas usia perkawinan perempuan yang rendah, banyak sekali terjadi perkawinan yang dikategorikan sebagai perkawinan anak.

Dengan menaikkan batas usia perkawinan perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, bukan berarti perkawinan anak tidak akan terjadi lagi, karena pemohon dispensasi terendah yang pernah tercatat adalah 11 tahun. Artinya, dengan naiknya usia perkawinan menjadi 19 tahun, kemungkinan permohonan dispensasi perkawinan menjadi bertambah.

Perkawinan anak di Indonesia sangat tinggi, tertinggi kedua di Asia dan tertinggi ketujuh di dunia. Pada 2018 diperkirakan lebih dari 190 ribu anak perempuan di Indonesia menikah di bawah umur 16 tahun (UNICEF, 2018). Sementara pada tahun 2018 Pengadilan Agama di seluruh Indonesia menerima lebih dari 13 ribu permohonan dispensasi kawin yang dimohonkan untuk anak perempuan, berarti hanya sekitar 3 persen perkawinan anak perempuan di bawah usia 16 tahun yang dimohonkan dispensasi (AIPJ2, 2019).

## Umur dan Reproduksi

Jumlah anak perempuan yang menikah lebih banyak dari pada anak laki-laki. Demikian juga umur anak perempuan lebih muda dari pada anak laki-laki. Usia rata-rata anak perempuan yang dimohonkan dispensasi kawin adalah 14,5 tahun dan usia rata-rata anak laki-laki dalam perkara dispensasi adalah 16,5 tahun.



Dari sisi perbedaan usia calon suami dan calon istri, sebanyak 8 dari 10 anak laki-laki yang dimohonkan dispensasi mempunyai calon istri sepeantaran antara 16-19 tahun, sementara hanya 3 dari 10 anak perempuan yang calon suaminya sepeantaran. Artinya, 7 dari 10 anak perempuan menikah dengan laki-laki, yang kemungkinan besar bukan pilihannya, tetapi pilihan orangtua, wali, dan sebagainya.

Sementara itu, dari sekitar 500 ribu putusan cerai yang dianalisis, 1 dari 4 istri (24 persen) menikah ketika anak-anak, namun hanya 1 dari 50 (2 persen) suami yang menikah ketika anak-anak. Angka 24 persen perempuan bercerai yang menikah ketika anak-anak mengindikasikan tingkat perceraian yang tinggi bagi perempuan yang menikah pada usia sebelum 18 tahun (AIPJ2, 2019).

Umur muda (rata-rata 14,5 tahun) bagi seorang anak perempuan sangat sangat rentan dan berisiko setelah menjadi istri. Karena setelah menikah, anak perempuan akan hamil, melahirkan, merawat, dan mengasuh anak. Dengan usia yang sangat muda dan organ reproduksi yang belum siap untuk hamil atau mengandung, anak perempuan berisiko mengalami berbagai gangguan dan penyakit yang berhubungan dengan organ reproduksi, seperti keguguran, melahirkan prematur, dan sebagainya.

### **Umur dan Kedewasaan**

Dari sisi kesehatan, perempuan dianggap siap untuk hamil dan merawat anak jika berusia di atas 20 tahun, karenanya perempuan dianggap dewasa ketika mencapai usia tersebut. Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang

Perlindungan Anak menyebut anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun. Ketika seorang telah mencapai usia 18 tahun dia bukan lagi dikategorikan sebagai anak, tetapi dia juga bukan orang dewasa. Masa transisi antara anak dan orang dewasa, pada usia antara 18-20 tahun, adalah saat seseorang dapat disiapkan untuk kawin.

Jika seorang perempuan menikah di usia 19 tahun, diharapkan dia akan melahirkan pada usia 20 tahun atau lebih, sehingga segala risiko yang berhubungan dengan organ reproduksi dapat diminimalisasi. Di samping itu, usia 19 tahun, baik bagi perempuan maupun laki-laki, juga telah mencapai kedewasaan secara psikologi, sosial, dan spiritual, sehingga pasangan suami-istri diharapkan dapat menata rumah tangga lebih baik.

Jika pasangan suami istri menikah setelah mencapai usia 19 tahun, jenjang pendidikan terendah yang ditamatkan adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, kedewasaan berpikir dapat dicapai sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan di dalam rumah tangga lebih baik.

### **Generasi Berkualitas Rendah**

Perkawinan bukan kebutuhan dan kepentingan anak. Perkawinan anak hanya melahirkan berbagai permasalahan bagi rumah tangga tersebut, keluarga, masyarakat, dan negara. Kekerasan terhadap perempuan, khususnya KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang pelakunya adalah suami dapat dilakukan oleh siapa saja, dan dari kelas mana saja, tetapi suami dengan tingkat pendidikan rendah sangat umum melakukan kekerasan.



Foto-foto: Taufan Ramli/Yayasan BaKTI

Sementara kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu kandung, maka ibu kandung muda atau ibu kandung yang berasal dari perkawinan anak juga sangat umum.

Karena itu, perkawinan anak tidak bisa diharapkan melahirkan generasi berkualitas untuk negeri ini. Perkawinan anak hanya menghasilkan generasi berkualitas rendah dan berbagai permasalahan yang akan menjadi beban masyarakat dan negara. Anak-anak yang lahir dari ibu-ibu yang masih berumur anak dapat membawa berbagai permasalahan, seperti lahir prematur, kurang gizi, stunting, dan sebagainya.

Di samping itu, karena masih berumur anak, apalagi dengan pendidikan yang rendah, ibu dan bapak ini tidak bisa diharapkan menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya. Bahkan kemungkinan mereka menjadi pelaku kekerasan dan eksploitasi terhadap anak-anaknya.

Untuk itu, pada Rabu 4 Desember 2019 bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Yayasan BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia) yang bergabung dalam Koalisi Stop Perkawinan Anak atas dukungan Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) dan AIPJ2 (Australia Indonesia Partnership for Justice) Tahap II, melaksanakan *Workshop* untuk mensosialisasikan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Narasumber *Workshop* adalah Theodora Putri dari AIPJ2 Jakarta, Dr. Nirwana Pananrang,

SH., M.Hum., Hakim Tinggi dan Anggota Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung, serta Nur Anti, SE., MT., Kabid Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulawesi Selatan, dengan moderator Husaima Husain.

Ketika memberi sambutan dalam acara pembukaan, Zusanna Gosal, Deputy Direktur Yayasan BaKTI menyebutkan, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang telah diadvokasi selama bertahun-tahun gagal disahkan. Tentu ini sangat mengecewakan, namun harus terus diadvokasi sampai RUU ini disahkan menjadi Undang-Undang. Tahun ini ada kemajuan yang cukup berarti karena pemerintah dan DPR RI mengesahkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini menaikkan batas usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun.

*Workshop* dibuka oleh Dr. Hj. Aisyah Ismail, SH., MH., Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Makassar. Dalam sambutannya Ketua PTA Makassar mengatakan bahwa, sejak Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 disahkan, banyak permintaan dispensasi yang telah masuk ke Pengadilan Agama di Sulawesi Selatan, karena itu hakim harus mempelajari PERMA No. 5 Tahun 2019. Karena PERMA ini menempatkan anak sebagai pihak yang mempunyai posisi penting yang harus didengar pandangannya terkait dengan permohonan dispensasi kawin.

#### INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program MAMPU-BaKTI, dapat menghubungi [info@bakti.or.id](mailto:info@bakti.or.id)



# SENTUH PUSTAKA

Semua  
Membantu  
Menghidupkan  
Perpustakaan

Oleh  
**TULUS WULAN JUNI**

**S**kor kemampuan membaca Indonesia pada *Programme for International Student Assessment (PISA) 2018* yang dikeluarkan oleh *The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* mengalami penurunan. Hasil dari pengukuran global untuk siswa berusia 15 tahun, khusus untuk kemampuan membaca menunjukkan bahwa rata-rata skor siswa



**Pembenahan ruang perpustakaan demi meningkatkan minat siswa untuk mengunjungi dan membaca di perpustakaan sekolah (kiri) Pembinaan dilakukan dengan terjun langsung tidak sekedar berkoordinasi saja dengan tenaga perpustakannya sehingga mempercepat penataan dan pengelolaan perpustakaan sekolah sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) (kanan atas) Foto : Dok. Sentuh Pustaka**

Indonesia adalah 371, skor tersebut di bawah rerata 79 negara-negara peserta PISA, yakni 487 untuk kemampuan membaca.

Tingkat literasi yang rendah, penyebab mendasar yang memiliki dampak sangat luas bagi kemajuan bangsa karena sebagian besar keterampilan dan pengetahuan yang lebih mutakhir diperoleh melalui kegiatan membaca. Dengan membaca mampu memahami, mengevaluasi, dan menyaring informasi dan mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari sumber bacaan. Untuk mewujudkan budaya baca di masyarakat membutuhkan proses dan proses itu dimulai sejak dini. Dalam hal ini, peran dan fungsi perpustakaan sekolah sangat dibutuhkan

selain sebagai sumber belajar warga sekolah juga sebagai peletak dasar tumbuhnya kegemaran membaca. Bayangkan lebih dari 1/3 dari waktu anak-anak sehari dihabiskan di lingkungan sekolah. Selama ini kegiatan pembinaan perpustakaan hanya dilakukan dari lingkup internal yang ditugaskan ke tempat binaan atau hanya berupa pemberian Bimtek perpustakaan sehingga kegiatan pembinaan khususnya Perpustakaan Sekolah tidak berjalan maksimal dan keberadaan perpustakaan tidak sesuai dengan standar. Perpustakaan sekolah harus dibina secara khusus sehingga keberadaannya dapat dimanfaatkan

secara maksimal. Menjawab tantangan tersebut, Dinas Perpustakaan Kota Makassar mulai tahun 2017 melakukan pendataan dan pembinaan perpustakaan sekolah dengan konsep berbeda dengan menggagas inovasi Sentuh Pustaka atau akronim “Semua Membantu Menghidupkan Perpustakaan”

Sentuh Pustaka menggunakan pendekatan kolaborasi sosial yang melibatkan berbagai pihak dalam kegiatan pembinaan perpustakaan terdiri dari unsur internal dari tim pembina perpustakaan sekolah dan unsur eksternal dari kelompok kerja pustakawan dan pegiat literasi, mitra dan penerbit dan pimpinan lembaga maupun kepala sekolah. Kehadiran program ini sekaligus memberdayakan pustakawan berprestasi dan pegiat literasi yang ada di Kota



Makassar. Program Sentuh Pustaka juga mengajak kepedulian beberapa penerbit sebagai mitra perpustakaan karena keberadaan penerbit dan perpustakaan bagai dua sisi mata uang yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan sebagai siklus pengembangan koleksi bahan perpustakaan. Selain itu kegiatan ini juga untuk menggugah kepedulian dari pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolah selaku penanggung jawab agar lebih memperhatikan peran perpustakaan sekolah sebagai salah satu sarana strategis untuk mendukung proses belajar mengajar dan menumbuhkan budaya baca.

Tahap awal tim pembina perpustakaan sekolah mulai melakukan pendataan perpustakaan sekolah. Hasil pendataan sebanyak 100 perpustakaan sekolah belum melakukan pengolahan, penataan ruang dan sistem administrasi sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) sehingga masih identik dengan gudang buku, selain itu seluruh perpustakaan sekolah belum memiliki visi, misi dan program kerja yang pada akhirnya peran perpustakaan belum dirasakan oleh warga sekolah. Pengelolaan perpustakaan yang kurang baik berimbas pada tingkat kunjungan siswa yang memanfaatkan perpustakaan sekolah. Hal

tersebut juga tentunya sangat memengaruhi Indeks Budaya Baca di Kota Makassar. Sentuh Pustaka diawali dengan sosialisasi program ke sekolah, dilanjutkan dengan pembekalan melalui *workshop* untuk pengelola yang diselenggarakan oleh mitra atau Dinas Perpustakaan Kota Makassar melalui kegiatan Bimtek Perpustakaan. Dilanjutkan dengan penataan ruang dan administrasi perpustakaan yang memenuhi standar minimal ruang perpustakaan (ruang baca, ruang koleksi & pengolahan) dengan memperhatikan artistik ruangan, serta kegiatan minat baca siswa yang berkelanjutan seperti lomba, kegiatan literasi, dan pameran.

Setelah melakukan pendataan sekolah dan melakukan pembinaan di tahun 2018, Program Sentuh Pustaka diimplementasikan di 10 sekolah yang terpilih dari 100 perpustakaan sekolah yang dibina di tahun 2017. Di tahun 2018 dilakukan di 10 titik sekolah yakni 6 di perpustakaan SMP/MTs dan 4 di perpustakaan SD. Untuk tahun 2019, 10 sekolah dipilih untuk dipersiapkan mengikuti akreditasi perpustakaan sekolah. Setiap tahun terdapat 100 sekolah yang dibina dan 10 sekolah sasaran yang menerima Program Sentuh Pustaka. Berdasarkan survei Independen Tri Tunggal Sejaya angka budaya baca di Kota Makassar pada



**Suasana perpustakaan sebelum (kiri) dan sesudah Inovasi Sentuh Pustaka yang dilakukan Dinas Perpustakaan Kota Makassar (kanan). Foto : Dok. Sentuh Pustaka**

tahun 2016 berada di angka 39,45 persen dan di tahun 2019 telah meningkat menjadi 45,07 persen. Dampak dari Sentuh Pustaka secara tidak langsung meningkatkan indeks Budaya Baca di Kota Makassar dan rata-rata jumlah kunjungan ke perpustakaan sekolah naik setelah kegiatan Sentuh Pustaka.

Selain itu, Program Sentuh Pustaka mampu memberikan dukungan pembinaan sebagai kewenangan Dinas Perpustakaan Kota Makassar kepada perpustakaan sekolah dengan kegiatan pendampingan kepada tenaga perpustakaan, penataan ruang dan pengolahan bahan perpustakaan untuk menghidupkan kembali peran perpustakaan sekolah sesuai Standar Nasional Perpustakaan sebagai sumber belajar dan mendorong anak-anak gemar membaca dan gemar berkunjung ke perpustakaan sekolah. Manfaat khusus yang dihasilkan dari kegiatan Sentuh Pustaka ini untuk siswa dan tenaga kependidikan adalah mempercepat penataan dan pengelolaan perpustakaan sekolah sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) sehingga

layanan perpustakaan dapat segera dinikmati oleh warga sekolah selain itu manfaat untuk sekolah dapat meningkatkan kualitas salah satu sarana pendidikan di sekolah.

Hasil yang dicapai dari program inovasi bukan saja untuk peningkatan kualitas perpustakaan sekolah sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP), peningkatan jumlah perpustakaan sekolah yang diakreditasi, peningkatan indeks budaya baca dan peningkatan jumlah kunjungan perpustakaan tetapi juga untuk meningkatkan peran dan wadah berbagi seluruh unsur eksternal. Keberhasilan program inovasi ini tidak saja untuk dirasakan oleh sekolah di Kota Makassar tetapi dapat direplikasi di berbagai daerah untuk pengembangan perpustakaan. Inovasi ini tentunya banyak manfaat yang dihasilkan selain yang paling utama adalah menguatkan peran perpustakaan sekolah dan yang tidak kalah penting meningkatkan kemampuan membaca siswa melalui pembudayaan kegemaran membaca sejak dini di lingkungan sekolah.

#### **INFORMASI LEBIH LANJUT**

Penulis adalah Inovator Sentuh Pustaka dan Pustakawan Madya di Dinas Perpustakaan Kota Makassar.

Dapat dihubungi melalui email: [twj\\_19@yahoo.co.id](mailto:twj_19@yahoo.co.id)



# Menyiapkan Fasilitator Sinergitas Perencanaan

Oleh  
**HALIA ASRIYANI &  
NYUR YAWATI**

**B**ertajuk “*Training of Trainer Sinergitas Perencanaan Kampung, Puskesmas dan Sekolah untuk Peningkatan Layanan Dasar*”, kegiatan ini sukses digelar di dua provinsi wilayah kerja KOMPAK – LANDASAN Fase II di Papua dan Papua Barat. Setelah sebelumnya Program LANDASAN Fase I difokuskan pada peningkatan kapasitas dan tata kelola kampung dan unit layanan dasar kesehatan dan pendidikan, maka pada LANDASAN Fase II, program akan berfokus pada sinergitas perencanaan kampung dengan unit layanan dasar kesehatan dan pendidikan dalam menghadapi permasalahan. Hal tersebut untuk mencapai tujuan utama yaitu meningkatnya akses masyarakat di Tanah Papua terhadap

## Kalau pembangunan kampung tidak melalui musyawarah bersama masyarakat, tidak terjadi pembangunan. Karena pembangunan yang sesungguhnya adalah melibatkan seluruh masyarakat di dalamnya

elayanan dasar untuk kesehatan dan pendidikan yang berkualitas.

ToT ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk menyiapkan fasilitator yang akan menularkan pengetahuan tentang konsep sinergitas di daerah dampingan. Sinergitas dalam perencanaan menjadi satu hal yang penting. Sebagaimana yang disampaikan oleh Donatus Motte, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua “Kalau pembangunan kampung tidak melalui musyawarah bersama masyarakat, tidak terjadi pembangunan. Karena pembangunan yang sesungguhnya adalah melibatkan seluruh masyarakat di dalamnya.” pungkasnya.

ToT yang diikuti oleh perwakilan dari sektor yang membidangi tiga sektor layanan dasar, yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) kesehatan dan pendidikan dari 9 kabupaten yaitu Kabupaten

Jayapura, Nabire, Asmat, Lanny Jaya Boven Digoel, Fakfak, Kaimana, Manokwari Selatan dan Sorong. Sebagai pemegang estafet sinergitas perencanaan, para peserta adalah orang-orang potensial yang dipilih dan diharapkan dapat mengimplementasikan perencanaan bersinergi di level kampung, Puskesmas dan sekolah di daerah masing-masing.

### Model Sinergi Perencanaan

Sinergi dimulai sejak dari perencanaan. Langkah tersebut dimulai ketika menyusun rencana pembangunan jangka menengah. Prosesnya pun tak ubahnya dengan tahapan perencanaan yang ada di setiap sektor tersebut. Modifikasi hanya dilakukan pada proses pengkajian masalah dengan mengatur *timeline* dari masing-masing sektor.

“Apa yang dilakukan LANDASAN tidak mengubah proses yang ada, kita tidak membongkar, kita berangkat dari apa yang kita lakukan dua tahun lalu, kampung, Puskesmas, dan sekolah sudah dilatih membuat perencanaan, agar capaian itu bisa lebih baik lagi maka kita perlu mengaitkan itu, bukan merombak tapi mengatur *timeline* dari masing-masing proses perencanaan, sehingga perencanaan itu dapat dimulai dalam waktu yang sama, proses inilah yang dimodifikasi untuk mencapai hal tersebut,” ujar Ricky Djodjoko, Monitoring and Evaluasi Manager LANDASAN.

Lantas, di titik mana proses perencanaan tersebut dikaitkan? Di tingkat kampung, perencanaan termodifikasi pada proses pengkajian kampung, di tingkat Puskesmas pada saat melakukan analisis situasi, sementara itu di sekolah pada saat penyusunan visi dan misi. Di titik tersebut tahapan perencanaan dimodifikasi dengan mengaitkan prosesnya.

Di awal, masing-masing sektor melakukan kajian mengenai kondisi kesehatan dan pendidikan di kampung bersangkutan berdasarkan data kinerja pada periode sebelumnya. Sementara kampung juga mulai membentuk tim penyusun dan penyalarsan arah kebijakan. Kampung kemudian melaksanakan kegiatan pengkajian kampung yang dihadiri oleh sektor Puskesmas dan sekolah dan masyarakat. Pada tahap ini, kampung melakukan refleksi, sedangkan Puskesmas dan sekolah menyampaikan kondisi kesehatan dan pendidikan. Dalam perencanaan juga perlu memastikan seluruh masyarakat berperan serta, termasuk memastikan bahwa aspek gender ada dalam proses perencanaan dan pembangunan kampung. Begitu pula dengan melibatkan kelompok rentan lainnya yaitu masyarakat adat dan disabilitas khususnya dalam hal aksesibilitas, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat. Masyarakat yang hadir pada forum kampung menyuarkan aspirasi dan harapan mereka,

proses ini juga menjadi bagian dari upaya edukasi kepada masyarakat dan pada akhirnya masyarakat menyadari masalahnya dan turut berkontribusi dalam upaya mengatasi tantangan pendidikan dan kesehatan di kampung mereka.

Proses selanjutnya adalah sektor kesehatan dan pendidikan bertemu kembali dalam proses pengkajian kampung. Mereka memaparkan rencana-rencana yang akan ditindaklanjuti oleh kampung, Puskesmas, dan sekolah. Inilah yang akan masuk ke dalam rencana pembangunan jangka menengah masing-masing.

Setelah itu, proses pun berjalan seperti proses yang ada pada masing-masing sektor hingga menghasilkan rencana tahunan masing-masing. Kampung memiliki Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK), Puskesmas memiliki Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK), sekolah memiliki Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Pada akhir periode, siklus kembali berulang dengan melakukan evaluasi capaian-capaian pada tahun sebelumnya. Hasil evaluasi pencapaian akan dibawa ke musyawarah kampung yang kembali dihadiri oleh semua sektor. Pada proses ini, akan diputuskan bersama kegiatan yang dapat dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Begitulah selanjutnya siklus sinergi perencanaan itu akan berjalan.

Dari tahapan ini, terdapat tiga prinsip yang harus dipahami dalam sinergi perencanaan. Pertama, membangun dasar informasi yang sama dalam melihat permasalahan untuk perencanaan. Kedua, memberi ruang kepada masyarakat menjadi subjek dari perencanaan unit layanan dan sebagai penerima manfaat dari rencana kegiatan unit layanan. Ketiga, membangun komitmen unit layanan untuk melakukan tindakan dalam rangka mencapai harapan dan kebutuhan masyarakat.

### Menyiapkan Fasilitator untuk Perencanaan Bersinergi di Kabupaten

Lima hari mengikuti ToT, mulai tampak kepercayaan diri dari peserta untuk menjadi fasilitator di kabupaten. “Selama ini, teman-teman di kampung melakukan proses perencanaan sendiri-sendiri. Dari pelatihan ini, saya sekarang tahu di mana celahnya untuk



mereka bisa bersinergi. Saya siap untuk memfasilitasi karena ini memang menjadi bagian dari tugas saya” ungkap Martha C. Yufuai, Staf Bidang Perencanaan Bappeda Kabupaten Jayapura.

Selain kesiapan menjadi fasilitator, para peserta juga mengakui tantangan-tantangan perencanaan yang selama ini mereka temui. Seperti yang disampaikan Ary Romainum, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire yang mengakui banyak kelemahan dalam melakukan perencanaan Puskesmas “Selama ini saya sendiri tidak menyadari bahwa sebenarnya Puskesmas bisa ikut serta dalam proses penyusunan RPJM kampung, ternyata kita juga bisa hadir untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan ikut mendorong pembangunan kampung dari sektor kesehatan. Saya kira ini akan sangat baik bagi penyelesaian permasalahan kesehatan di kampung.” Ungkapnya.

Sementara di sektor pendidikan, Herlina Sopia Silubun, Kepala Sekolah YPPK Ayam



Foto-foto: Dok. LANDASAN/Yayasan BaKTI

Kabupaten Asmat menyadari bahwa membuat perencanaan sekolah, terutama menentukan program yang tepat itu memang bukanlah hal yang mudah, namun jika itu bisa dibahas bersama tentu akan lebih ringan. “Saya selama ini alami membuat perencanaan sekolah itu susah sekali, tapi kalau kita bisa bersinergi, kita bisa bahas dan cari solusinya bersama-sama. Kita juga jadi tahu masyarakat itu maunya bagaimana, dari kampung juga bisa bantu dengan dasar data pendidikan yang kita sampaikan.” ungkap Herlina.

“ToT ini sangat luar biasa, karena kami di pendidikan saat mendampingi sekolah saat menyusun rencana kerja itu hanya sebatas berandai-andai, tidak melibatkan kampung dan Puskesmas. Jadi kami memberi gambaran saja, jika guru mengajarkan tentang organ tubuh mengalami kesulitan sebenarnya minta tolong ke Puskesmas saja menggunakan alat-alat mereka, tapi pertanyaannya ini bisa direalisasikan tidak. Nah melalui kegiatan ini kebetulan dari kampung ada, Puskesmas ada, trus masing-masing punya

program ternyata tiga-tiganya bisa sinkron. Ini akan menjadi pembelajaran yang bagus seandainya bukan hanya sekolah sasaran saja, namun semua sekolah bisa memerankan ini dengan kampung, pasti luar biasa.” Tuning Supriadi, Fasilitator Perencanaan Sekolah, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Papua Barat dalam kegiatan *Training of Trainer (ToT) Sinergi Perencanaan Kampung, Kesehatan, dan Pendidikan* untuk meningkatkan layanan dasar di Papua Barat.

Kegiatan ToT ini masih butuh proses panjang untuk diwujudkan dan terus berkelanjutan. Namun melihat semangat dari para peserta, bolehlah kita menaruh harapan besar untuk perencanaan kampung yang bersinergi sebagai upaya meningkatkan layanan dasar di Papua dan Papua Barat.

#### INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program KOMPAK-LANDASAN Fase II dapat menghubungi [info@bakti.or.id](mailto:info@bakti.or.id)



2

## FOOD, LAND AND PEOPLE

*“ Eat local food, support your roots.”*

Oleh  
**ESTER ELISABETH UMBU TARA**

**P**angan lokal memiliki beberapa keunggulan, seperti lebih dekat dengan rumah tangga, adaptasi terhadap iklim tinggi dan mudah dibudidayakan, bahkan beberapa tanaman tidak membutuhkan perawatan khusus atau pemberian pupuk pabrik untuk dapat tumbuh dengan baik. Hal ini membuat pangan lokal dapat menjadi makanan pokok sehat yang tersedia dekat dengan rumah.

Keinginan saya untuk belajar tentang pangan lokal bertambah kuat sejak kegiatan *Visit and writing*. Sebuah kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan oleh Perkumpulan PIKUL untuk mendorong anak muda tertarik dan ingin tahu tentang pangan lokal. Kami berkunjung ke beberapa desa dan melihat bagaimana pandangan masyarakat desa sendiri tentang pangan lokal. Ketika berkunjung di Desa Utiuh Tuan, pertama kalinya saya mengenal tanaman sorgum atau masyarakat Kupang mengenalnya dengan sebutan ‘jagung rote’. Bentuknya yang menarik dan saat melihatnya membuat rasa ingin tahu tentang tanaman ini semakin tinggi.



**Mama Debora Kase dari Desa Bosen memegang Bunga Turi Merah di kebun (kiri) Sorgum Merah pertama kali yang saya lihat di kebun milik Pak Ferdi Ati. Klub Dalen Mesa, Desa Uitiuhana, Kecamatan Semaui selatan**  
Foto: Dok Pribadi

---

Setelah kegiatan itu kami turut mulai mengkampanyekan tanaman ini sebagai salah satu pengganti beras melalui sosial media hingga membawa sorgum ke Kota Kupang untuk dilihat secara langsung dan dikonsumsi masyarakat di Kota Kupang.

Pengalaman ini membuat saya menyadari bahwa dalam mengkampanyekan pangan lokal, tidak cukup hanya tanamannya. Siapa yang menanam dan bagaimana hasil olahannya menjadi penting. Karena bagi kebanyakan orang, tampilan visual dan cerita yang kuat akan membuat mereka

penasaran dan semakin ingin tahu tentang suatu pangan lokal.

Pada tahun 2018, saya mendapat kesempatan untuk belajar di New Zealand melalui Program INSPIRASI (Indonesian Young Leaders programme) yang ditujukan untuk pemimpin muda dari Indonesia Timur. Program ini dikelola oleh UnionAID bekerja sama dengan Yayasan BaKTI, Universitas Teknologi Auckland (AUT), didukung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dan didanai oleh New Zealand *Ministry of Foreign Affairs and Trade* (MFAT). Melalui program ini saya banyak belajar tentang pembangunan berkelanjutan, dimana salah satunya adalah bagaimana melihat peluang pangan lokal sebagai peluang pembangunan berkelanjutan yang memengaruhi beberapa tujuan dari United Nations SDG's 2018 seperti *Zero Hunger, Good health and wellbeing* dan *Climate action*.

Melalui program ini, saya juga mendapat kesempatan untuk berlatih Bahasa Inggris sehingga



pada kunjungan ke komunitas-komunitas yang mendukung isu pangan lokal di sana dapat berjalan dengan baik. Saya mendapat kesempatan secara pribadi untuk berkunjung ke Papatuanuku Kokiri Marae, sebuah komunitas yang melestarikan tanaman lokal di lahan mereka. Tujuan komunitas ini adalah untuk kesejahteraan komunitas di sekitar mereka melalui pangan yang mereka tanam. Selain itu, saya juga berkesempatan mengikuti *workshop* yang dilaksanakan oleh *Heart Foundation*. Saya belajar tentang makanan sehat dan bagaimana menghitung kalori dalam setiap produk makanan yang dijual di swalayan atau toko-toko.

Lebih lanjut saya berkesempatan untuk bertemu Joseph yang mendedikasikan dirinya untuk mengajarkan orang-orang yang memiliki masalah berat badan, kolesterol dan diabetes melalui kelas memasak. Beliau mengatakan bahwa makanan lokal yang diolah harus menjadi makanan yang tidak hanya sehat, namun dari segi rasa haruslah layak atau enak, sehingga

**Menjelaskan menu pangan lokal kepada anak-anak siswa-siswi yang ingin mencicipi pangan lokal.**

Foto: Dok. SkolMus

---

mendorong orang lain untuk mengkonsumsinya secara teratur.

Pengetahuan tentang pentingnya pangan lokal terus berlanjut ketika saya mendapat kesempatan untuk menghadiri acara keluarga dari orang tua asuh saya, Will Illohia dan Mesepa Edwards. Mereka memberi saya pengalaman untuk mengonsumsi pangan lokal yang berasal dari daerah mereka. Ada hal yang sama, bahwa mereka tidak mengonsumsi beras ataupun roti. Umbi-umbian dan pisang menjadi pangan karbohidrat utama mereka. Saya kemudian berpikir, jika mereka melihat tanaman itu sebagai pangan pokok, maka seharusnya di daerah saya, Timor, juga dapat melakukan hal yang sama.

Selain itu saya bersama teman-teman INSPIRASI yang lain ikut memasak makanan

## Umbi-umbian dan pisang menjadi pangan karbohidrat utama mereka. Saya kemudian berpikir, jika mereka melihat tanaman itu sebagai pangan pokok, maka seharusnya di daerah saya, Timor, juga dapat melakukan hal yang sama.

tradisional suku Maori bersama komunitas *Te Araroa*. Mereka memiliki cara masak khusus, yaitu Hangi. Hangi merupakan sajian tradisional Suku Māori yang dimasak dengan panas bumi di bawah tanah. Hangi mengalami beberapa modifikasi karena kendala daerah dengan panas bumi yang terbatas. Beberapa komunitas memasak dengan membuat lubang yang cukup besar, meletakkan makanan, lalu menutupnya dan kemudian menyalakan api di atas lubang yang sudah ditutupi. Sedangkan komunitas lain menggunakan oven. Namun jenis makanan hampir sama. Umbi-umbian, sayuran dan daging.

Belajar dari pemateri berpengalaman, kunjungan ke komunitas-komunitas di New Zealand dan mendapat dukungan dana dari MFAT New Zealand maka saya memulai proyek "*People, Land and Food*". Sebuah proyek yang salah satunya adalah membuat sebuah buku resep berbasis pangan lokal di beberapa desa yang menjadi dampingan organisasi saya bekerja, Perkumpulan PIKUL.

Perjalanan mengumpulkan resep-resep lokal dari perempuan-perempuan di empat desa di Pulau Timor membuat saya melihat bagaimana mereka memanfaatkan apa yang tumbuh di lahan dan apa yang ditumbuhkan alam bagi diri mereka dan keluarga. Desa-desa yang saya kunjungi adalah Desa Oh Aem 2, Kecamatan Amfoang Selatan, Desa Bosen dan Taiftob, Kecamatan Mollo Utara, Timor Tengah Selatan dan Desa Halik Laran, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Dari ke empat desa ini terkumpul 21 resep dengan cara mengolah sama untuk beberapa bahan dan berbeda untuk bahan lainnya. Pangan lokal ini di olah dengan cara sederhana hingga sulit, namun merupakan sebuah tradisi yang diteruskan secara turun temurun.

Dalam proyek ini bukan hanya resep yang saya kumpulkan, tapi ada arsip visual untuk

makanan dan perempuan yang menanamnya. Bagi saya hal ini sangat penting, karena kekuatan dari arsip visual dapat menjangkau mata dan turun ke hati sehingga menjadi suatu media kampanye yang kuat. Selain itu, informasi dan pengetahuan dapat disebarkan dengan mudah dari masa ke masa dan dapat menjadi pembanding untuk riset lainnya yang membutuhkan arsip ini.

Pada tanggal 3 Desember 2019, bekerjasama dengan komunitas SkolMus dan 3 orang pegiat pangan lokal yaitu Nona Heo, Noldy Franklin dan Asty Banoet untuk membuat inovasi resep berbahan dasar pangan lokal, saya membuat sebuah acara bernama *Bapalok: Baicip* pangan lokal. Acara ini mengundang masyarakat umum untuk mencicipi makanan berbahan dasar pangan lokal dan memberi tanggapan. Sekitar 50 orang hadir, mulai dari siswa-siswi, mahasiswa hingga pekerja. SkolMus berpartisipasi dari desain poster publikasi, video publikasi, dalam dokumentasi kegiatan dan foto produk.

Setiap proses yang saya lalui, mulai dari setiap kesempatan turun ke desa dan kegiatan yang saya lakukan, membuat saya yakin bahwa perempuan mengambil peran yang amat penting dalam menjaga kelestarian pangan lokal di lahan maupun di meja makan. Selain itu, saya menyadari, sebagai perempuan, saya mampu melakukan sesuatu. Saya mungkin tidak menanam, saya hanya makan. Namun saya dapat menyebarkan semangat dan melestarikan pangan lokal dengan cara saya sendiri. Sayapun percaya dengan mengkonsumsi pangan lokal kita dapat membantu sebuah budaya untuk tetap ada. *Let's eat local food and support your roots.*

### INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Alumni Program INSPIRASI 2018 dan dapat dihubungi melalui email: [elisabethlsa86@gmail.com](mailto:elisabethlsa86@gmail.com)



# 18 Pelatihan dan Masih akan Terus Bertambah

Oleh **DESY MUTIALIM & SYAIFULLAH**

# A

lfrida adalah satu dari 40 peserta *workshop* evaluasi kegiatan sosialisasi untuk Sekber BANGGA Papua Kabupaten Paniai. Alfrida memang bukan anggota Sekretariat Bersama (Sekber) BANGGA Papua Kabupaten Paniai, tapi oleh Sekber Paniai tenaganya sangat dibutuhkan mengingat Alfrida, dan teman-temannya sesama kader Posyandu menjadi garda terdepan yang membantu Sekber Paniai mengumpulkan data calon penerima manfaat BANGGA Papua dan sekaligus mensosialisasikan program tersebut di



Foto: Syaifullah/Yayasan BaKTI

tingkat kampung. Ada yang datang dari kampung di sekitar Madi dan Enarotali, tapi ada juga yang datang dari Distrik Obano, distrik di seberang danau Paniai yang harus ditempuh dengan *speed boat* melintasi danau yang dingin. Salah satunya adalah Alfrida Pigai, perempuan berambut pendek yang sehari-harinya bertugas sebagai kader Posyandu di Distrik Obano.

### Melatih Beragam Tokoh Kunci

Melalui mandat yang diterima BaKTI untuk meningkatkan kapasitas komunikasi anggota Sekber Provinsi dan Sekber Kabupaten serta mitra-mitranya. BaKTI melakukan serangkaian pelatihan, sejak Maret 2018 hingga September 2019, BaKTI telah menggelar 18 pelatihan komunikasi. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk *workshop*, *training of trainer* (ToT), mentoring bahkan konsultasi di tingkat provinsi dan kabupaten di 3 kabupaten uji coba BANGGA Papua yaitu Asmat, Lanny Jaya dan Paniai.

Hingga September 2019, BaKTI telah melatih 298 orang melalui 18 pelatihan komunikasi anggota Sekber Provinsi dan Sekber Kabupaten yang terdiri dari staf dinas-dinas terkait pelaksanaan program BANGGA Papua, lembaga pemerintah lain, staf pemerintahan distrik (kecamatan) dan staf pemerintahan kampung.

Peningkatan kapasitas komunikasi anggota Sekber ini amat penting karena mereka adalah cikal bakal pelatih dan pendamping untuk pelaksana program di tingkat kabupaten dan distrik. Kemampuan melakukan sosialisasi program secara efektif perlu mereka kuasai dengan baik.

Tantangan geografis wilayah dan keterbatasan sumber daya membuat Sekber Kabupaten harus berpikir kreatif mencari mitra kerja untuk membantu tugasnya. Jumlah anggota sekber dan dana operasional yang terbatas membuat mereka tidak mampu menjangkau calon-calon penerima manfaat program di pelosok kabupaten. Untuk itulah mereka harus mencari dan berkolaborasi dengan mitra pendukung di kabupaten, tokoh kunci yang didengar dan dipercaya oleh masyarakat diharapkan berperan penting dalam mensosialisasikan BANGGA Papua kepada calon penerima manfaat, termasuk melakukan edukasi tentang penggunaan dana BANGGA Papua yang benar sesuai dengan tujuannya.

Mitra pendukung ini terdiri dari kader Posyandu, bidan Puskesmas/kampung, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan anggota Tim Penggerak PKK di provinsi dan kabupaten. Setidaknya terdapat 105 mitra pendukung di tingkat provinsi dan kabupaten yang telah mengikuti pelatihan komunikasi. Dari 18 pelatihan komunikasi yang dilakukan, mayoritas peserta pelatihan adalah orang asli Papua yaitu 217 orang, atau sebesar 72,8 persen dari seluruh peserta pelatihan. Statistik ini sangat menggembirakan karena ini berarti ada banyak orang asli Papua yang mendapatkan penguatan kapasitas dan peningkatan pengetahuan komunikasi melalui berbagai pelatihan yang difasilitasi oleh BaKTI.

### Memberdayakan Perempuan

Hal lain yang menarik dari data yang dihimpun terkait pelatihan komunikasi yang difasilitasi BaKTI adalah bahwa 41,3 persen dari

seluruh peserta pelatihan (123 orang) adalah perempuan. Walau angka ini memang belum menunjukkan perbandingan yang seimbang antara peserta pelatihan laki-laki dan perempuan, namun perbedaan angka persentase keduanya tidak mencolok (41,3 persen dan 58,7 persen). Pada kenyataannya, anggota Sekber provinsi maupun Sekber kabupaten memang didominasi oleh laki-laki.

Namun demikian, ada tren menarik yang terjadi setelah pelaksanaan BANGGA Papua berjalan hampir setahun. Jumlah perempuan yang terlibat dalam program ini semakin bertambah. Apalagi ketika Sekber Kabupaten mulai menggandeng mitra-mitra seperti kader Posyandu, bidan kampung, bidan Puskesmas, petugas kesehatan lain, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan anggota Tim Penggerak PKK.

Karena peran mereka yang penting dan layanan intensif yang telah mereka berikan kepada masyarakat, masyarakat mendengarkan nasihat mereka. Masyarakat percaya kepada mereka. Karena itulah Sekber Kabupaten membangun kerjasama dengan mereka untuk menjangkau calon-calon penerima manfaat hingga ke tingkat kampung.

Paniai kembali menjadi kabupaten yang paling banyak menyumbangkan peserta pelatihan perempuan. Sampai September 2019, telah ada 42 perempuan yang ikut serta dalam pelatihan komunikasi. Angka ini mencakup 34,1 persen dari total jumlah perempuan peserta pelatihan. Kabupaten Asmat menyusul Paniai dengan 33 peserta perempuan (26,8 persen) dan Lanny Jaya menyumbangkan angka 20 orang peserta perempuan (16,3 persen). Di tingkat provinsi, sebanyak 28 peserta perempuan atau 22,8 persen).

### Merancang Pelatihan Sesuai Kebutuhan

Satu-satunya pelatihan dengan materi yang sama yang dilakukan untuk Sekber Provinsi dan Sekber Kabupaten adalah ToT (*training of trainers*) Komunikasi Persuasif. Tujuan pelatihan ini agar anggota Sekber memahami dengan baik cara melakukan sosialisasi program secara efektif. Selain itu, mereka dibekali kemampuan untuk melakukan pelatihan yang sama kepada pelaksana program lainnya.

Selain ToT, pelatihan-pelatihan di kabupaten khususnya, dirancang berdasarkan hasil *needs assessment* yang dilakukan bersama Sekber kabupaten, atau berdasarkan permintaan Sekber kabupaten untuk mengatasi tantangan-tantangan komunikasi khusus yang muncul di kabupatennya.

Sekber Kabupaten Asmat, misalnya, mengidentifikasi pentingnya pelatihan menulis bagi anggotanya dan pelaksana program di tingkat distrik. Pelatihan tersebut untuk mengenali perubahan-perubahan atau praktik baik yang terjadi karena pelaksanaan BANGGA Papua di Asmat, untuk kemudian didokumentasikan dalam bentuk tulisan pendek. Nantinya, tulisan-tulisan ini diharapkan dapat dipublikasikan dalam media internal dan eksternal.

Sekber Kabupaten Paniai bersama dengan Tim BaKTI pernah mengidentifikasi tantangan-tantangan komunikasi di kabupaten tersebut, sekaligus mendiskusikan jalan keluarnya. Hasilnya, Sekber Paniai memutuskan untuk membentuk kerjasama dengan tokoh-tokoh kunci di tingkat distrik dan kampung dan meminta Tim BaKTI mendampingi pelatihan komunikasi untuk mereka. Tidak berhenti di situ, dalam waktu dekat, Sekber Paniai bersama Tim BaKTI juga merencanakan melakukan pelatihan tentang bagaimana membuat foto yang bercerita untuk merekam praktik-praktik baik dari pelaksanaan BANGGA Papua di Paniai.

Jumlah 18 pelatihan yang sudah difasilitasi BaKTI atas dukungan KOMPAK, tentu masih akan terus bertambah. Setelah melaksanakan program selama lebih dari setahun, tantangan-tantangan komunikasi yang muncul, menjadi sangat khusus untuk setiap kabupaten. Sekber Provinsi dan Sekber Kabupaten juga akan meningkatkan kualitas renja komunikasi menjadi lebih strategis. Setelah belajar dari pengalaman melakukan komunikasi strategis selama kurang lebih setahun, anggota Sekber Provinsi dan Sekber Kabupaten, harusnya naik kelas. Artinya, mereka harus lebih siap dan berani menghadapi tantangan-tantangan komunikasi yang lebih kompleks dalam melaksanakan Program BANGGA Papua.

### INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program BANGGA Papua dapat menghubungi [info@bakti.or.id](mailto:info@bakti.or.id)



## Kegiatan di BaKTI

13 Februari 2020

### Studi Banding Yayasan Setara dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah memiliki komitmen kuat dalam pembentukan kota/kabupaten layak anak dengan cara mendorong replikasi model layanan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI). Model PKSAI akan direplikasi di 6 kota dan kabupaten yaitu Blora, Pekalongan, Wonosobo, Banyumas, Sragen dan Brebes. Upaya pembentukan model layanan PKSAI tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan untuk pencapaian kabupaten/kota Layak Anak dan SDGs di Provinsi Jawa Tengah. Untuk memperkuat Kapasitas Tim Asistensi Teknis PKSAI di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Dinas Sosial Jawa Tengah, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DinsosP3AKB) Kabupaten Klaten, Dinas Sosial Surakarta, Bappeda Surakarta, Lembaga Perlindungan Anak, dan Yayasan Setara, mereka



melakukan kunjungan ke Kantor BaKTI dan Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Kabupaten Gowa sendiri telah berhasil menerapkan layanan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) yang meliputi enam komponen yakni regulasi dan kebijakan, kelembagaan, mekanisme kerja, rentang layanan, sumber daya manusia, dan sistem manajemen data dan informasi. Kunjungan yang difasilitasi oleh Yayasan Setara dengan dukungan dari UNICEF ini bertujuan untuk belajar tentang sinergi layanan, manajemen PKSAI dan mengetahui inovasi layanan yang dikembangkan oleh PKSAI Gowa. Selain itu, untuk mengetahui sistem data dan informasi pendataan anak dalam situasi rentan serta untuk menyusun draft rencana aksi untuk keberlanjutan PKSAI di Jawa Tengah.

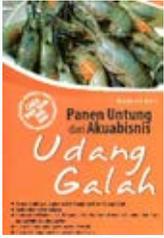
20 Februari 2020

### Diskusi Inspirasi BaKTI "Sentuh Pustaka"

Sentuh Pustaka akronimi dari Semua Membantu Menghidupkan Perpustakaan merupakan inovasi dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar untuk mengembangkan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca. Berangkat dari kekhawatiran rendahnya minat baca di Kota Makassar. Salah satu penyebab yang diidentifikasi karena kondisi perpustakaan yang kurang menarik dan tidak tertata. Kondisi yang jauh dari rasa nyaman menyebabkan pengunjung enggan menghabiskan waktu membaca di perpustakaan. Tim Sentuh Pustaka kemudian membongkar perpustakaan untuk di tata agar anak nyaman saat berkunjung. Semua sistem peminjaman dan pengembalian buku telah terdapat menggunakan komputer. Untuk membangun strategi Sentuh Pustaka yaitu meningkatkan komitmen dan dalam mengelola perpustakaan sudah diperkuat dengan Perka (peraturan perpustakaan) seperti jumlah buku, jumlah rak dan penataannya. Hal ini disampaikan oleh Bapak Tulus Wulan Juni selaku inovator Sentuh Pustaka sekaligus Pustakawan Dinas Perpustakaan Kota Makassar saat Diskusi Inspirasi BaKTI yang digelar 20 Februari lalu di Kantor BaKTI. Dalam diskusi ini beberapa sekolah



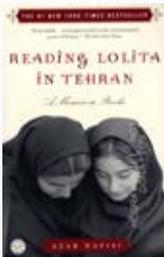
menyatakan minatnya untuk bekerjasama dengan Sentuh Pustaka mengelola perpustakaan sekolah. Salah satu layanan Sentuh Pustaka yakni Dongkel with mobile library berhasil terpilih Top 99 inovasi Nasional mewakili Makassar dalam Lomba Inovasi Pelayanan Publik tahun 2017, Sentuh pustaka juga berhasil menjadi juara 1 top *Innovative Mayor Award* tahun 2019 yang diselenggarakan Pemerintah Kota Makassar. Dampak dari Sentuh Pustaka secara tidak langsung meningkatkan indeks Budaya Baca di Kota Makassar di mana pada tahun 2016 berada di angka 39,45 persen dan di tahun 2019 telah meningkat menjadi 45,07 persen.



## Panen Untung dari Akuabisnis Udang Galah

**PENULIS** M. Ghufuran Kordi K.

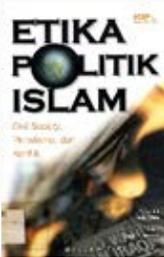
Udang galah (*macrobrachium rosenbergii*) adalah salah satu biota air tawar spesies asli bernilai ekonomi tinggi. Udang galah berukuran lebih besar dibandingkan spesies udang air tawar lainnya. Udang galah dapat tumbuh hingga mencapai ukuran panjang 32 cm/ekor dan berat 350g/ekor. Karena itu, udang ini populer sebagai udang raksasa air tawar. Udang galah mempunyai harga yang cukup tinggi. Produksinya tidak hanya untuk pasar domestik, tetapi juga ekspor ke negara-negara Asia dan Eropa. Buku ini mengupas tuntas cara budidaya yang baik sehingga dapat panen untung dari bisnis udang galah.



## Reading Lolita in Tehran

**PENULIS** Azar Nafisi

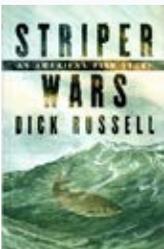
Setiap Kamis pagi selama dua tahun di Republik Islam Iran, seorang guru yang berani dan menginspirasi bernama Azar Nafisi diam-diam mengumpulkan tujuh siswa perempuannya yang paling berkomitmen untuk membaca klasik barat terlarang. Ketika pasukan moralitas Islam melakukan serangan sewenang-wenang di Teheran, kaum fundamentalis menguasai universitas-universitas, dan sebuah sensor buta melumpuhkan ekspresi artistik, gadis-gadis di ruang tamu Azar Nafisi mempertaruhkan kerudung mereka dan membenamkan diri dalam dunia Jane Austen, F. Scott Fitzgerald, Henry James, dan Vladimir Nabokov. Dalam memoar yang luar biasa ini, kisah-kisah mereka menjadi terkait dengan yang mereka baca. Membaca Lolita di Teheran adalah eksplorasi ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi tirani dan perayaan kekuatan sastra yang membebaskan.



## Etika Politik Islam; Civil Society, Pluralisme, dan Konflik

**PENULIS** Bassam Tibi, dkk

Buku ini mengkaji etika politik Islam tentang *civil society*, batas wilayah, pluralisme, dan perang dan damai. Para penulis membahas pertanyaan-pertanyaan tentang keragaman, yang mendiskusikan antara lain kebijakan rezim-rezim Islamis terhadap wanita dan minoritas agama. Bab-bab tentang perang dan damai membahas isu-isu penting dan hangat seperti etika Islam tentang jihad, kondisi-kondisi yang sah untuk mendeklarasikan perang dan cara perang yang layak.



## Striper Wars; An American Fish History

**PENULIS** Dick Russel

Ketika populasi ikan *striped bass* mulai menurun pada awal 1980-an, penulis dan nelayan Dick Russell ada di sana untuk memimpin kampanye konservasi pantai Atlantik yang menghasilkan salah satu serangan balik satwa liar yang paling luar biasa dalam sejarah perikanan. Striper Wars adalah kisah inspiratif Dick Russell tentang orang-orang dan peristiwa yang bertanggung jawab atas pelestarian salah satu ikan favorit Amerika itu dan apa yang telah terjadi sejak itu. Buku ini adalah kisah yang penuh dengan pahlawan—dan beberapa penjahat—saat berjuang untuk menyelamatkan striped bass yang bermigrasi ke pantai dari Massachusetts ke Maryland.

**Buku-buku tersebut diatas dapat dibaca di Perpustakaan BaKTI.**

**Jika anda memiliki buku atau publikasi lainnya yang ingin dipublikasikan sila hubungi kami di BaKTI.**